

PERANAN DIVISI SILIWANGI DALAM MEMPERJUANGKAN

TEGAKNYA KEDAULATAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1946-1949

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:

Maria Sulistiyowati

NIM: 001314038



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2005

SKRIPSI

**PERANAN DIVISI SILIWANGI DALAM MEMPERJUANGKAN
TEGAKNYA KEDAULATAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1946-1949**

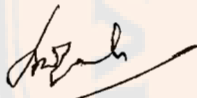
Oleh:

Maria Sulistiyowati

NIM: 001314038

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Drs. G. Moedjanto, M.A.

Tanggal...18-MEI...2005

Pembimbing II



Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M.

Tanggal...18-MEI...2005

SKRIPSI

**PERANAN DIVISI SILIWANGI DALAM MEMPERJUANGKAN
TEGAKNYA KEDAULATAN REPUBLIK INDONESIA**

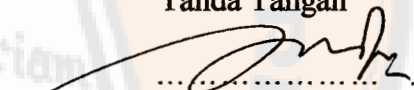
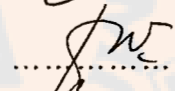
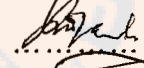
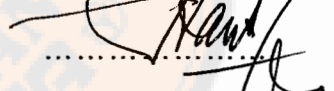
TAHUN 1946-1949

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Maria Sulistiyowati

NIM: 001314038

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 13 Juni 2005
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Susunan Panitia Penguji

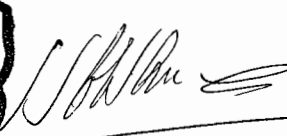
Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua : Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.	
Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota : Drs. G. Moedjanto, M.A.	
Anggota : Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.	
Anggota : Drs. A.A. Padi	

Yogyakarta, 13 Juni 2005

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma,




Dr. A.M. Slamet Soewandi, M.Pd.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini khusus kupersembahkan untuk:

- Bapak dan Ibuku tercinta, terimakasih atas doa, cinta dan kasih sayang serta kepercayaan yang diberikan kepadaku.
- Kakakku tercinta Mas Katman, Katno, Mbak Triyanti, Mbak Kris, dek Santi dan dek Agus, terimakasih atas doa, cinta dan dukungannya.
- Dek Dwi Kurniadi, trimakasih atas bantuan terjemahannya.
- Mas Minto yang selalu setia menemani, mendengarkan curhatku dan selalu membantuku dimasa-masa sulit, terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya.
- Sahabatku Handayani, terimakasih atas cinta dan kebersamaannya selama ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO

Di Dunia Ini Orang Yang Paling Miskin

Adalah Orang Yang Tidak Mempunyai Harapan

Bukan Orang Yang Tidak Mempunyai Harta Kekayaan

(By, Maria)

Hidup Itu Adalah Nyanyian, Maka Nyanyikanlah

Hidup Itu Adalah permainan, Maka Mainkanlah

Hidup Itu Adalah Tantangan, Maka Hadapilah

Hidup Itu Adalah Mimpi, Maka Jadikanlah Kenyataan

Hidup Itu Adalah Pengorbanan, Maka Persembahkanlah

Hidup Itu Adalah Cinta, Maka Nikmatilah

(Sai Baba)

Setiap Pekerjaan Dan Kesibukan

Tak Pernah Menjadi Bermakna

Kalau Tidak Pernah Direfleksikan

(Sokrates)

Cinta dan Kebahagiaan Yang Ada Di Dunia Ini

Hanyalah Cinta Dan Kebahagiaan Yang Sifatnya Semu

Karena Cinta Dan Kebahagiaan Itu Akan Simna Tertelan Oleh Perjalanan Waktu

Cinta Dan Kebahagiaan Yang Kekal Dan Abadi Akan Kita Dapat Setelah Kematian

(By, Maria)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 13 - Juni - 2005

Penulis



(Maria Sulistiyowati)

ABSTRAK

**PERANAN DIVISI SILIWANGI
DALAM MEMPERJUANGKAN TEGAKNYA
KEDAULATAN REPUBLIK INDONESIA
1946-1949**

Oleh: Maria Sulistiyowati

Skripsi yang berjudul “Peranan Divisi Siliwangi dalam Memperjuangkan Tegaknya Kedaulatan Republik Indonesia dari Tahun 1946-1949” bertujuan ingin membahas tiga permasalahan: Pertama, Apa latar belakang dan bagaimana terbentuknya Divisi Siliwangi; Kedua, bagaimana peranan Divisi Siliwangi dalam Penumpasan Pemberontakan Terhadap Republik Indonesia 1946-1949; Ketiga, mengapa Divisi Siliwangi mengosongkan daerah basisnya di Jawa Barat.

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sejarah. Adapun langkah-langkah penulisan metode sejarah mencakup; heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah politik dan pendekatan sejarah sosial.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: bahwa yang melatarbelakangi terbentuknya Divisi Siliwangi yaitu keadaan Bangsa Indonesia yang pada saat itu sedang mengalami penjajahan oleh Bangsa Barat, dan terjadinya pemberontakan-pemberontakan bersenjata yang merongrong kewibawaan pemerintah Republik Indonesia. Peranan Divisi Siliwangi dalam memperjuangkan tegaknya Kedaulatan Republik Indonesia lebih pada penerapan sikap perjuangan para prajurit Siliwangi dalam membela, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Dalam hal ini Divisi Siliwangi tidak pernah absen dalam kancah perjuangan Bangsa dan Negara bersama-sama dengan rakyat, khususnya rakyat Jawa Barat. Tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Divisi Siliwangi sangat berat baik dalam perang kemerdekaan maupun dalam penumpasan gerombolan-gerombolan bersenjata yang merongrong kewibawaan pemerintah. Kendala-kendala yang harus dihadapi oleh Divisi Siliwangi merupakan tantangan yang paling berat, namun tantangan ini tidak membuat para prajurit Siliwangi patah semangat, tekad dan semangat juang mereka sudah bulat untuk membebaskan rakyat dan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan dan hidup damai.

Perkembangan dan perjuangan Divisi Siliwangi dari masa kemasa tidak pernah padam. hal ini dapat kita lihat hingga sekarang nama dan sumbangan Divisi Siliwangi masih cukup eksis serta semakin dikenal oleh rakyat Indonesia. Sumbangan Divisi Siliwangi sangat besar terhadap Bangsa Indonesia dan masyarakat Jawa Barat pada khususnya. Perjuangan pejuang-pejuang Siliwangi tersebut merupakan sebagian dari pada sejarah perjuangan Bangsa yang patut dikenang sepanjang masa, yang patut diwarisi dan menjadi tauladan bagi generasi penerus. Perjuangan dan pengorbanan para prajurit Siliwangi telah menghantarkan bangsa Indonesia bebas dari belenggu penjajahan dan hidup aman serta damai.

ABSTRACT

**The Role Of Siliwangi Division
In Struggle for Maintaining
The Sovereignty of Republic of Indonesia
(1946-1949)**

By: Maria Sulistiyowati

This thesis entitled "The Role of Siliwangi Division in Struggle for Maintaining the Sovereignty of Republic of Indonesia (1946-1949)" has objective to discuss three following problems: first, what background motivated the formation of Siliwangi Division and how it is formed; second, what role the Siliwangi Division played in destroying the rebellion toward Republic of Indonesia from 1946 to 1949; and third, why did Siliwangi Division vacate its bases in West Java.

It was a descriptive analytic study, which used historical method. The writing steps of historical method included heuristics, resource critique, interpretation, and historiography, while the approach used political and social approach of history.

The results showed that: the condition of Indonesian at that time, that was under colonial domination of West and many armed rebellions that undermined the governmental authority of Republic of Indonesia become background of the Siliwangi Division formation. Roles played by Siliwangi Division in maintaining the Indonesian sovereignty was more on moral application in Siliwangi troops in defending, maintaining and filling in independence. In this case, Siliwangi Division was never absent in fighting for the nation and state together with people, especially the people of West Java. Siliwangi Division bore heavy task and responsibility both in independence war and in suppressing armed rebellions that undermined the governmental authority. These heaviest constraints faced by Siliwangi Division could not discourage the troops of Siliwangi. They had very determined will to release Indonesian from colonial domination and to live a peace live.

The development and struggle of Siliwangi Division time by time were never put out. Up to now, name and contribution of Siliwangi Division still exist and is well-known by Indonesian people. Siliwangi Division has contributed many for Indonesian people and West Java people, in particular. Their struggles are part of national struggle history that should be remembered all time and to be inherited to and a model for the next generation. The struggle and sacrifice of Siliwangi soldiers had led Indonesian to get freedom from colonial domination and live in peace and safety.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan Kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa dan Bunda Maria atas kasih dan kebaikan cintanya yang luar biasa memenuhi dalam setiap langkah hidupku. Sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Divisi Siliwangi dalam Memperjuangkan Tegaknya Kedaulatan Republik Indonesia dari tahun 1946-1949 dapat terselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma.
4. Drs. G. Moedjanto, M. A., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing serta mengoreksi penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, saran, kritik dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen USD khususnya dosen pendidikan sejarah yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan dan membimbingku selama kuliah.
7. Sekretariat pendidikan sejarah, Mas Sidik yang begitu sabar melayani dan membantu semua keperluanku, terimakasih atas bantuannya.

8. Bapak Sukimun dan Ibuku Masinem, yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, doa, cinta, biaya, dan kasih sayangnya dengan penuh kesabaran.
9. Semua Pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Dengan rasa syukur, saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan penulisan selanjutnya.

Yogyakarta, 13 Juni 2005

Penulis



Maria Sulistiyowati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

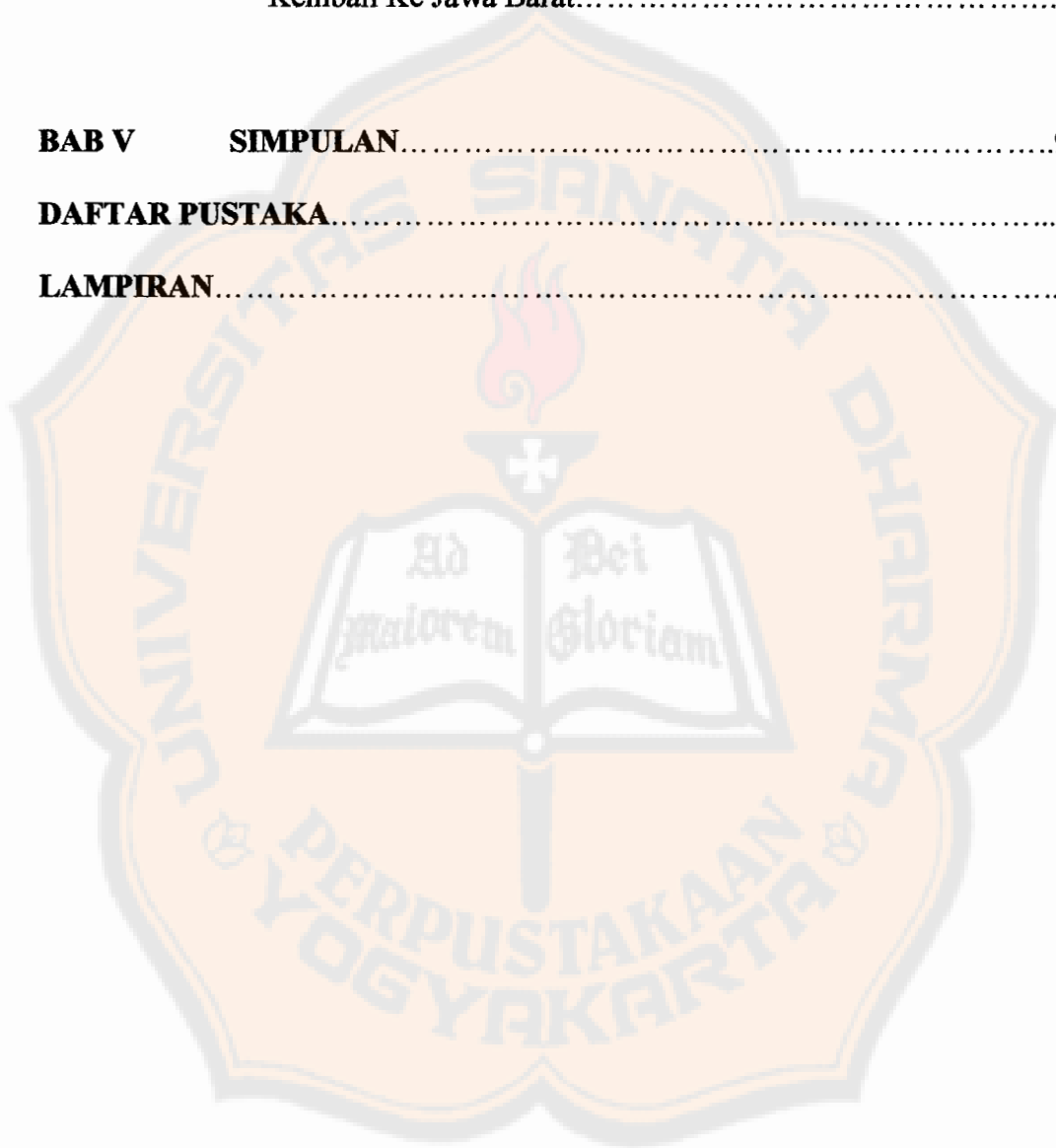
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Landasan Teori.....	13
F. Metodologi Penulisan.....	15
G. Metode Penelitian dan Pendekatan.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	20



BAB II	LATAR BELAKANG DAN PROSES TERBENTUKNYA	
	DIVISI SILIWANGI 1946-1949.....	23
	A. Latar Belakang Terbentuknya Divisi Siliwangi.....	23
	B. Proses Pembentukan Divisi Siliwangi.....	25
	1. Badan Keamanan Rakyat Jawa Barat Dibentuk.....	27
	2. Pembentukan Badan Kelasykaran/Perjuangan.....	39
	3. Pembentukan dan Perkembangan Tentara Nasional Indonesia di Jawa Barat.....	45
BAB III	PERANAN DIVISI SILIWANGI DALAM PENUMPASAN	
	PEMBERONTAKAN TERHADAP RI 1946-1949.....	55
	A. Penumpasan Sisa Gerombolan Bambu Runcing di Banten Selatan.....	55
	B. Penumpasan Pemberontakan Westerling Dengan APRA-nya.....	58
	1. Rencana Westerling Dengan APRA-nya.....	61
	2. Hasil Perundingan Antara Indonesia-Belanda Soal APRA.....	63
	C. Penumpasan Andi Abdul Azis.....	64
	D. Penumpasan Pemberontakan Republik Maluku Selatan.....	66
BAB IV	SEBAB-SEBAB DIVISI SILIWANGI MENGOSONGKAN	
	DAERAH BASISNYA DI JAWA BARAT.....	69

A. Agresi Militer Belanda I Tidak Menghancurkan Siliwangi.....	69
B. Persetujuan Renville.....	75
C. Agresi Militer Belanda Ke-II Menggerakkan Siliwangi Kembali Ke Jawa Barat.....	87
BAB V SIMPULAN.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	96



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 :Manfaat penulisan skripsi “Peranan Divisi Siliwangi dalam Memperjuangkan Tegaknya Kedaulatan RI 1946-1949”.
Halaman.96
- Lampiran 2 :Silabus Halaman.106
- Lampiran 3 :Lagu Kenangan “Bandung Selatan”. Halaman.112
- Lampiran 4 :Lagu Perjuangan “Halo-halo Bandung”. Halaman.113
- Lampiran 5 :Pataka Siliwangi. Halaman.114
- Lampiran 6 :Gambar para tokoh Panglima Divisi Siliwangi dari yang pertama sampai yang ke empatbelas. Halaman.117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masa perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia guna menegakkan pancasila dan membebaskan dari belenggu penjajahan pada tahun 1945 sampai akhir tahun 1949. Pemerintah Indonesia mengalami tekanan-tekanan berat baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan bidang militer. Dalam hal ini, Kodam VI /Siliwangi di sepanjang masa tidak pernah absen dalam kancah perjuangan Bangsa dan Negara bersama-sama dengan rakyat, khususnya rakyat Jawa Barat. Tidak heran jika nama Divisi Siliwangi hingga sekarang masih dikenal di kalangan masyarakat dan kalangan militer, khususnya TNI AD di Jawa Barat. Dari awal kemerdekaan hingga sekarang Divisi Siliwangi mempunyai peranan penting dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan.

Pada hari-hari sekitar menjelang hari ulang tahun komando daerah militer VI/Siliwangi yang ke XXXII pada tanggal 20 Mei 1978, prajurit Siliwangi yang memperoleh kepercayaan, kehormatan dan tanggungjawab memimpin kelangsungan tradisi gemilang Divisi Siliwangi adalah Mayor Jenderal TNI Himawan Soetanto selaku panglima Divisi Siliwangi yang ke tigabelas, yakni semenjak ke duabelas Panglima Divisi Siliwangi yang mendahuluinya, Kolonel A.H.Nasution, Letnan Kolonel Daan Yahya, Kolonel Abimanyu, Kolonel Sadikin, Kolonel A.E. Kawilarang, Kolonel Suprayogi, Brigadir Jenderal TNI R.A.Kosasih dan Mayor Jenderal TNI Ibrahim Ajie, Mayor Jenderal TNI H.R.Dharsono,

Mayor Jenderal TNI A.J. Witono S, Mayor Jenderal TNI Wahyu Hagono dan Mayor Jenderal TNI Aang Kunaefi K. Wilayah tanggungjawab Divisi Siliwangi pada waktu sekarang ini meliputi wilayah Jawa Barat minus DKI Jakarta Raya , Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi.

Pada Saat-saat pembentukannya, wilayah tanggungjawab itu meliputi seluruh wilayah Jawa Barat, yakni meliputi wilayah Keresidenan-keresidenan Banten dengan Kabupaten-kabupatennya Serang, Pandeglang dan Lebak; Bogor dengan Kabupaten- kabupatennya Bogor, Sukabumi dan Cianjur; Priangan dengan Kabupaten-kabupatennya Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis; Cirebon dengan Kabupaten-kabupatennya Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Indramayu serta Jakarta dengan Kabupaten- kabupatennya Jakarta, Kerawang dan Purwakarta.

Siliwangi adalah nama yang menghimpun kenangan kejayaan masa silam wilayah Jawa Barat, yang oleh susunan tentara kebangsaan kita di wilayah Jawa Barat, diagung- keramatkan menjadi nama pengenalnya¹. TNI-AD kita yang ada di wilayah Jawa Barat, telah menjelmakan dirinya sebagai perwujudan daripada hasrat-hasrat atau kemauan rakyat Jawa Barat guna membela, mengisi, menegakkan dan selanjutnya mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 di bidang bersenjata. Ia menjelmakan diri secara serta-merta dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Semenjak dan mulai tanggal 20 Mei 1946 TNI-AD di Jawa Barat ini memakai nama Siliwangi sebagai nama pengenalnya. Rakyat Jawa Barat memiliki tradisi militer yang telah panjang usianya. Untuk lebih

¹ Disjarahdam VI / Siliwangi, *Siliwangi dari masa ke masa*, Bandung, Angkasa Bandung, hal. 1

jelasnya, tidak ada salahnya apabila kita segarkan/mengingat kembali kenangan kita pada episode di bawah ini.

Kita ingat akan kerajaan Taruma Negara yang berdiri di sekitar abad ke-5. Apakah sekiranya kerajaan itu mungkin dapat berdiri kalau dayamampu militer dan pertahanannya tidak memungkinkan untuk itu? Namun bagaimanapun juga, pada masa jayanya kerajaan Kesatuan/Persatuan Nusantara di bawah pimpinan Keprabuan Majapahit, susunan kenegaraan regional Jawa Barat yang waktu itu bernama kerajaan Pajajaran, sifatnya adalah sekutu daripada tradisi kemiliteran rakyat Jawa Barat tidak memberikan kemungkinan itu? Dalam rangka Keprabuan Majapahit mewujudkan aspirasi membina susunan Kenegaraan Kesatuan/Persatuan Nusantara pada masa itu, sebagaimana diungkapkan oleh Patih Majapahit, Maha Wira Gajah Mada di dalam "Sumpah Palapanya" pada tahun 1331, kontingen prajurit-prajurit dari Jawa Barat tidak pula ketinggalan untuk ikut serta di dalamnya. Pada tahun 1527, suatu rombongan armada Portugis dari basisnya di Malaka, di bawah pimpinan Francisco de Sa yang mencoba-coba hendak menanamkan kekuasaan Portugis di Jakarta, secara serentak telah diserbu dan dihancurkan oleh prajurit-prajurit Jawa Barat pada masa itu di bawah pimpinan Faletchan yang kemudian kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Demikian pula serangan Portugis pada tahun 1528 telah dapat digagalkan.² Dengan demikian maka kemenangan militer itu pada hakekatnya telah menunda datangnya periode "Kegelapan Penjajahan" dalam sejarah Tanah Air kita.

² *Ibid*, hal. 5

Pada tahun 1546, dalam rangka mengkonsolidasi diri, dalam usaha untuk membina susunan Kenegaraan Kesatuan/Persatuan Nusantara sesudah runtuhnya Keprabuan Majapahit, maka kerajaan Demak telah melancarkan suatu operasi terhadap kerajaan Blambangan di ujung Timur Pulau Jawa. Untuk melaksanakan maksudnya itu, maka Faletihan dari wilayah Jawa Barat, diberi kepercayaan penuh untuk menjadi panglima operasi tersebut.

Dalam operasi militer itu, tidak sedikit rakyat Jawa Barat yang ikut serta menyerbu dinding-dinding batu kota benteng Panarukan dengan tangga-tangga penyerangannya (*Stormladders*).³ Dalam menanggulangi Belanda pun warga Jawa Barat tidak sedikit mencatat episode-episode karya juangnya yang antara lain menampilkan nama-nama pahlawan.

Pada sekitar tahun 1677, ketika rakyat di Jawa Tengah dan Jawa Timur melancarkan perjuangan besar di bawah pimpinan seorang putera Madura bernama Taruna Jaya dalam rangka mengusir penjajahan Belanda, maka daya mampu wilayah Jawa Barat dalam bentuk kapal, uang dan senjata diperbantukan pula kepada perjuangan besar itu.

Pada tahun 1808, meletuslah pula perlawanan terhadap penjajahan Belanda yang waktu itu dipimpin oleh Daendels, di berbagai penjuru Jawa Barat: di Banten, Sumedang, Cirebon dan lain-lainnya. Ketika Sultan Agung Anjakrakusumo dari kerajaan Mataram di Jawa Tengah melancarkan operasi militernya yang tersohor itu pada tahun 1628, yaitu usahanya untuk mengusir Belanda dari Jakarta yang dikuasainya semenjak tahun 1619, pasukan anak-anak

³ *Ibid*, hal. 6

Jawa Barat dari Sumedang dan Lembah Ukur juga tidak ketinggalan untuk ikut serta di bawah pimpinan panglimanya masing-masing. Demikianlah antara lain sekelumit tradisi militer rakyat Jawa Barat dari masa -masa yang lalu. Kesemuannya itu selaras dengan keadaan dan perkembangan geografis, demologis, sosial, politis dan budaya panggung sejarah Tanah Air kita.

Kematangan jiwa kemiliteran rakyat Jawa Barat tampak pula dalam perjuangan-perjuangan melawan penjajahan Jepang sebagaimana yang dipimpin oleh Kyai Haji Zainal Mustofa (Singaparna Februari 1944), Kyai Emas dkk (Kaplongan, Karang Ampel, Indramayu April 1944) dan lain-lain. Yang banyak tidak kita sadari, bahwa wilayah Jawa Barat beserta daya mampu dan élan perjuangannya, senjatanya telah memberikan ilham dan kesanggupan bagi lahirnya dan gerak-gerik perjuangan bagian terbesar partai-partai politik di masa perjuangan Nasional di zaman penjajahan Barat dan Proklamasi 17 Agustus 1945 pun terjadi di wilayah Jawa Barat.

Sumber” mata air” Divisi Siliwangi sudah barang tentu adalah warga Jawa Barat, oleh , dari dan untuk siapa ia ada dan menjelma.⁴ Warga Jawa Barat itu pada dasarnya adalah rakyat yang lembut, yang disemarakikan oleh rasa keagamaan, kebudayaan serta kekeluargaan yang dalam. Pada dasarnya rakyat Jawa Barat tidak memiliki watak seorang perantau dan pengembara. Kalau boleh pilih, mereka lebih suka ngendon saja di kampung halaman. Akan tetapi bagi Divisi Siliwangi, tugas adalah tugas dan dharma bhakti, yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan disiplin. Maka bermunculanlah anak-anak Jawa

⁴*Ibid*, hal. 3

Barat, Si Maung Siliwangi di seluruh pelosok Tanah Air di dalam rangka menunaikan tugas dan dharma bhaktinya bagi Proklamasi 17 Agustus 1945. Bahkan anak-anak Siliwangi telah pula nglanglang buana ke luar Tanah Air, menjalankan tugas internasional.

Pada umumnya setiap kesatuan di lingkungan organisasi TNI, terutama di lingkungan TNI-AD, mempunyai tradisi perjuangan dan ciri khas tersendiri, tidak sama antara kesatuan yang satu dengan kesatuan yang lainnya. Demikian pula kesatuan Divisi Siliwangi di lingkungan TNI-AD, memiliki tradisi perjuangan yang merupakan ciri khas Siliwangi, yang membedakan diri dengan ciri khas kesatuan lain. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh Siliwangi yaitu adanya sifat taat dengan tulus hati untuk selalu mematuhi keputusan yang telah di tetapkan oleh pemerintah RI. Salah satu bukti seperti yang tercantum di atas di antaranya ialah pada waktu Siliwangi mematuhi keputusan hasil-hasil perjanjian Renville, mereka harus meninggalkan Jawa Barat daerah perjuangan yang paling di cintai. Dengan hati yang berat, tetapi dengan penuh rasa tanggungjawab putera-putera Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pengalaman perjalanan hijrah yang penuh suka dan duka, tetapi akhirnya sampai juga ke daerah tujuan hijrah, baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur.

Pada waktu pasukan Siliwangi tiba di daerah hijrah, masih harus lagi mematuhi pelaksanaan program pemerintah RI tentang rekonstruksi dan rasionalisasi. Betapa pedih dan duka lara yang dihadapi para prajurit Siliwangi (KRUZ). Ribuan prajurit harus melepaskan diri dari ikatan Siliwangi yang pulang kembali ke Jawa Barat. Sebagian dari mereka masih ada yang terus mengembara

ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sebanyak lebih kurang 35.000 orang anggota TNI selesai dihijrahkan ke wilayah yang dikuasai RI, dengan perincian: Kira-kira sebanyak 22.000 diberangkatkan dengan kendaraan atau angkutan yang disediakan Belanda, sedangkan sisanya dengan berjalan kaki melalui gunung-gunung dan hutan-hutan.

Dengan segala kepatuhan yang dimiliki prajurit Siliwangi, akhirnya berhasil dibentuk Kesatuan Divisi Siliwangi (KRUZ) yang handal, dan tangguh menghadapi musuh-musuh negara kesatuan RI. Siliwangi siap siaga setiap melaksanakan tugas negara. Sesudah Siliwangi mengalami rasionalisasi mulailah Siliwangi berbenah diri menghadapi kemungkinan kembali ke medan juang di Jawa Barat, apabila Belanda kembali menyerang RI.

Dalam situasi yang demikian itu, meletuslah pemberontakan PKI/Moeso di Madiun, yang diawali dengan kerusuhan di Solo, dikenal dengan peristiwa serambatan. Sejak saat itu panggilan suci menumpas pemberontakan PKI/Moeso di Madiun diserahkan kepada Siliwangi. Suatu tugas mulia yang harus dihadapi membela negara kesatuan RI. Bersama-sama dengan kesatuan lainnya Siliwangi berhasil menumpas pemberontakan PKI/Moeso, baik di daerah Madiun dan sekitarnya dalam waktu yang relatif singkat.

Dengan semangat juang dan sikap disiplin yang dibarengi loyalitas kepada bangsa dan negara RI merupakan salah satu keberhasilan Siliwangi dalam menumpas pemberontakan PKI/Moeso 1948. Sulit untuk diukirkan dengan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan kebesaran jiwa dan semangat juang para prajurit Siliwangi dalam mengemban setiap tugas yang dilaksanakan dengan

segala kepatuhan. Prajurit Siliwangi menyadari bahwa tiada tugas yang dilaksanakan dengan hasil sukses dengan tiadanya pengorbanan para pejuang. Kendati demikian, prajurit Siliwangi selalu siap siaga melaksanakan tugas mulia di medan laga, demi keutuhan Negara dan Bangsa Indonesia.

Siliwangi, bagi bangsa Indonesia khususnya warga Jawa Barat merupakan kunci pembuka perbendaharaan kenangan dan harapan tentang kejayaan dan pengharapan-pengharapan baik mengenai masa silam, kini dan masa datang. Karena amal perjuangan dan pengabdian Siliwangi dalam rangka usaha mensukseskan Proklamasi dan Revolusi 17 Agustus 1945 sangat besar. Sumbangan yang diberikan oleh Divisi Siliwangi terhadap bangsa Indonesia dan masyarakat Jawa Barat baik itu sumbangan materil maupun spirituil sudah tak terhitung lagi nilainya. Dengan semangat yang tinggi mereka rela meninggalkan keluarga, tanah kelahiran bahkan nyawapun mereka rela mengorbankannya. Perjuangan Divisi Siliwangi dari awal kemerdekaan hingga kini ternyata tidak sia-sia, malah banyak membuahkan hasil dan semakin dekat dengan rakyat serta hingga sekarang cukup dikenal dikalangan masyarakat umum.

Berkat sumbangan Divisi Siliwangi bangsa Indonesia berhasil melewati masa-masa penjajahan dan dapat bebas dari belenggu penjajahan serta berhasil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena jasa-jasa Siliwangi yang cukup besar maka kesatuan TNI-AD di wilayah Jawa Barat memakai nama Siliwangi sebagai nama pengenalnya. Siliwangi memberikan sumbangan yang besar terhadap bangsa Indonesia, rakyat Jawa Barat dan kesatuan TNI-AD hingga

sekarang. Dengan motto "*Esa Hilang Dua Terbilang*" Siliwangi tetap eksis dan penuh semangat dalam perjuangan.

Dalam Memperjuangkan Tegaknya Kedaulatan RI Tahun 1946-1949 tidak hanya Divisi Siliwangi yang mempunyai peranan penting dalam mengusir para penjajah. Selain Divisi Siliwangi banyak organisasi-organisasi lain yang juga mempunyai peranan penting dalam Memperjuangkan Tegaknya Kedaulatan RI. Diantaranya: Rakyat Sipin, HANSIP (Badan Kesosialan), Pemuda-pemuda Kampung Bandung, Pemuda Pelajar, Urusan Kesehatan, dan Lasykar Wanita Indonesia. Tugas dari Lasykar Wanita adalah: Melakukan penyelidikan/menjadi mata-mata, menyediakan pembekalan/membuat dapur umum, dan merawat pejuang-pejuang kita yang menjadi korban.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas untuk mengetahui lebih jelas Peranan Divisi Siliwangi dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan RI tahun 1946-1949. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

1. Apa Latar Belakang dan Bagaimana Terbentuknya Divisi Siliwangi ?
2. Bagaimana Peranan Divisi Siliwangi Dalam Penumpasan Pemberontakan Terhadap RI ?
3. Mengapa Divisi Siliwangi Harus Mengosongkan Daerah Basisnya di Jawa Barat ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan Latar Belakang dan Bagaimana Terbentuknya Divisi Siliwangi.
- b. Menjelaskan Peranan Divisi Siliwangi Dalam Penumpasan Pemberontakan Terhadap RI.
- c. Menjelaskan Sebab-sebab Divisi Siliwangi Mengosongkan Daerah Basisnya di Jawa Barat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna:

- a. Bagi perkembangan ilmu sejarah, penelitian ini dapat menambah informasi dan memperkaya khasanah pengetahuan sejarah khususnya tentang peranan Divisi Siliwangi dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan RI tahun 1946-1949.
- b. Bagi para pembaca, penelitian ini dapat memperluas cakrawala dan pengetahuan sejarah khususnya tentang Peranan Divisi Siliwangi dalam Penumpasan Pemberontakan Terhadap RI tahun 1946-1949.
- c. Bagi mahasiswa sejarah, penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan tentang peranan Divisi Siliwangi dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan RI tahun 1946-1949.

D. Kajian Pustaka

Guna membahas masalah yang dikemukakan maka dipakai beberapa sumber untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Sumber-sumber yang digunakan dapat dibagi dalam sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah kesaksian daripada seorang saksi dengan mata kepala sendiri, saksi dengan panca indra yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakan. Sumber sekunder merupakan kesaksian daripada siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahnya.⁵ Ada beberapa sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

Pertama, Disjarahdam VI/Siliwangi “Siliwangi dari masa ke masa” diterbitkan oleh penerbit Angkasa Bandung, tahun 1978, merupakan sumber sekunder sekaligus sumber primer yang dijadikan acuan pokok. Buku ini berisi mengenai sejarah singkat Prabu Siliwangi, Peranan Divisi Siliwangi dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan RI tahun 1946-1949. Buku ini merupakan sumber yang paling penting sehingga merupakan acuan paling pokok digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

Kedua, karangan Himawan Soetanto “Rebut Kembali Madiun” diterbitkan oleh pustaka Sinar Harapan, tahun 1994 merupakan sumber sekunder sekaligus sumber primer yang dijadikan sebagai buku acuan pokok yang kedua, digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Buku ini juga sangat penting karena memuat tentang keadaan daerah Jawa Timur dan Jawa Barat yang dijadikan

⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah (terjemahan)*, Jakarta, UI Press, 1969, hal. 35

sebagai tempat tujuan hijrah, perlawanan gerilya Siliwangi serta keadaan/situasi politik dalam negeri menjelang persetujuan Renville.

Ketiga, karangan A.H.Nasution “Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 3” diterbitkan oleh Disjarahad dan penerbit Angkasa Bandung, 1978, buku ini berisi tentang perpecahan perjuangan, pembinaan ketentaraan dan akibat bertempur sambil diplomasi di daerah-daerah serta politik militer.

Keempat, karangan A.H.Nasution “Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 4” diterbitkan oleh Disjarahad dan penerbit Angkasa Bandung, 1978, buku ini berisi mengenai sekitar persetujuan Linggajati, pro dan kontra Linggajati.

Kelima, karangan A.H.Nasution Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 5 diterbitkan oleh Disjarahad dan penerbit Angkasa Bandung, 1978, buku ini berisi mengenai agresi militer Belanda I, gerakan militer Belanda I serta campur tangan Dewan Keamanan PBB.

Keenam, karangan A.H.Nasution “Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 6” diterbitkan oleh Disjarahad dan penerbit Angkasa Bandung, 1978, buku ini berisi mengenai perjuangan politik, perkembangan militer dan keadaan gerilya, mewujudkan perang wilayah di Jawa Barat, keadaan perjuangan di berbagai daerah menjelang “Persetujuan Renville”, serta persetujuan Renville.

Ketujuh, karangan A.H.Nasution “Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 7” diterbitkan oleh Disjarahad dan penerbit Angkasa Bandung, 1978, buku ini berisi mengenai praktek “Renville”, perjuangan di daerah-daerah pendudukan Belanda, serta keadaan di berbagai daerah setelah persetujuan Renville.

Kedelapan, karangan A.H.Nasution “Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 8” diterbitkan oleh Disjarahad dan penerbit Angkasa Bandung, 1978, buku ini berisi mengenai pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.

Kesembilan, karangan R.W.Smail, Bandung in The Early Revolution 1945-1946, Southeast Asia Program Departemen of Asian Studies, New York, 1964, buku ini berisi tentang peristiwa-peristiwa dari tahun 1945-1946 di Bandung, puncak terjadinya Revolusi dan Bandung Lautan Api.

E. Landasan Teori

Dalam penelitian ada beberapa konsep sebagai dasar landasan teori untuk penulisan. Konsep-konsep tersebut adalah peranan, Divisi, Siliwangi, memperjuangkan, kedaulatan, Republik dan Indonesia. Penjelasan beberapa konsep tersebut penting karena merupakan landasan teori.

Peranan dapat diartikan suatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang pertama. ⁶Peranan Divisi Siliwangi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di nilai berhasil. Terbukti bangsa Indonesia sudah terbebas dan merdeka dari belenggu penjajahan Bangsa Belanda. Bukti lain misalnya hingga saat ini nama Siliwangi dijadikan sebagai nama pengenalnya TNI-AD yang ada di wilayah Jawa Barat. Dan sampai sekarang Divisi Siliwangi masih berperan aktif dalam memperjuangkan, menegakkan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan khususnya dalam bidang kemiliteran.

⁶ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal.735

Dalam penyusunan penelitian ini juga digunakan konsep divisi dapat diartikan sebagai kesatuan militer yang besar yang biasanya lengkap dengan peralatannya, yang didatangkan untuk memperkuat penjagaan keamanan.⁷ Divisi adalah kesatuan besar TNI dengan tugas pertahanan suatu daerah tertentu. Terdiri dari kesatuan-kesatuan mobil, 4 sampai 5 Brigade dan kesatuan-kesatuan teritorial, 4 sampai 5 sub teritorial Command dan beberapa KDM.⁸

Siliwangi adalah nama yang menghimpun kenangan kejayaan masa silam wilayah Jawa Barat, yang oleh susunan tentara kebangsaan kita di wilayah Jawa Barat, diagung-keramatkan menjadi nama pengenalnya.⁹

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia memperjuangkan adalah berjuang untuk merebut sesuatu (kemerdekaan nusa dan bangsa) dari tangan penjajahan asing.¹⁰

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, Kemerdekaan, dari kata merdeka yang artinya bebas, tidak terikat, atau tidak dijajah, dapat diartikan lepas dari segala ikatan yang tidak pantas (layak), sehingga menjadi bebas untuk menentukan nasib sendiri demi segala kebaikan. Dalam pengertian negara, kemerdekaan merupakan suatu keadaan atau kondisi negara yang tidak dijajah atau berada di bawah kekuasaan ideologi lain. Biasanya negara yang bersangkutan memberi jaminan kebebasan atau kemerdekaan kepada warga negaranya. Dengan kata lain, kemerdekaan pula diartikan sebagai keleluasaan bagi setiap warga negara untuk melibatkan diri dalam kegiatan politik dan sosial kemasyarakatan,

⁷ Anton.M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 210

⁸ Himawan Soetanto, *Rebut Kembali Madiun*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal. 306-307

⁹ Disjarahdam VI/Siliwangi, *op. cit*, hal. 1

¹⁰ Anton.M.Moeliono, *op. cit*, hal .794

tanpa adanya berbagai paksaan atau tekanan dari pihak masyarakat dan pemerintah atau negara.¹¹

Dalam penyusunan penelitian ini juga digunakan konsep Kedaulatan. Dalam bidang hukum Tatanegara, suatu istilah yang lajim dipergunakan untuk menjelaskan pengertian kekuasaan tertinggi di dalam negara. Pada zaman modern kekuasaan tertinggi di dalam negara dianggap berada pada rakyat dan hal ini disebut asas kedaulatan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kedaulatan adalah: Kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara atau daerah.¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Republik adalah: Pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang Presiden.¹³ Sedangkan arti dari Indonesia adalah: Nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia.¹⁴

Dalam penyusunan penelitian ini juga berhubungan dengan Persetujuan Renville, dapat diartikan sebagai nama kapal US Navy Ship, yang dipergunakan sebagai tempat perundingan antara RI dan Belanda pada akhir tahun 1947-1948. Hasil perundingan itu dikenal dengan nama perundingan Renville.

F. Metodologi Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam rangka penulisan ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan

¹¹ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta, Cipta Adi Pustaka, hal. 341-342

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 188

¹³ *Ibid*, hal. 744

¹⁴ *Ibid*, hal. 330

keadaan objek penilaian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁵ Selain itu metode deskriptif dapat diartikan sebagai metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Untuk memberikan bobot lebih tinggi pada metode ini, maka data atau fakta yang ditemukannya harus diberi arti tidak sekedar menyajikan secara deskriptif data atau fakta yang terkumpul harus diolah dan ditafsirkan.

Metode deskriptif banyak memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai macam masalah. Jadi deskriptif analitis merupakan metode penulisan mengenai suatu kejadian dengan data atau fakta yang diolah secara analitis. Data-data mengenai Divisi Siliwangi dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan RI diolah secara analitis.

Masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Pertama, apa latar belakang dan bagaimana terbentuknya Divisi Siliwangi. Kedua, bagaimana peranan Divisi Siliwangi dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan RI dan ketiga, mengapa Divisi Siliwangi harus mengosongkan daerah basisnya di Jawa Barat.

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 63

G. Metode Penelitian dan Pendekatan

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka penulisan Peranan Divisi Siliwangi dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan RI tahun 1946-1949, ada empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekamam dan peninggalan masa lampau.¹⁶

Tahapan pertama yaitu heuristik atau proses pengumpulan data yang relevan untuk keperluan subyek yang diteliti. Sumber data dalam penulisan ini diperoleh dari buku-buku yang ada dipergustakaan yang bersifat primer atau sekunder. Buku-buku yang diperoleh dari lembaga sosial atau perpustakaan lain yang berkaitan dengan Divisi Siliwangi atau yang berkaitan dengan pemberontakan PKI di Madiun dan yang berkaitan dengan perang kemerdekaan Indonesia. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku karangan Disjarahdam VI/Siliwangi "Siliwangi dari Masa ke Masa" buku karangan Himawan Soetanto" Rebut Kembali Madiun" buku karangan A.H.Nasution "Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, jilid 3, jilid 4, jilid 5, jilid 6, jilid 7, jilid 8, jilid 9, jilid 10 dan lain-lain.

Tahap kedua kritik sumber dalam penelitian sejarah merupakan langkah yang harus dilakukan untuk menghindari adanya kepalsuan suatu sumber atau untuk mengetahui apakah data yang ada dapat dipertanggungjawabkan

¹⁶ Louis Gottschalk, *op.cit.* hal. 32

keasliannya atau tidak.¹⁷ Kritik sumber mempunyai tujuan untuk menghindari kepalsuan sumber, apalagi sebagian besar sumber merupakan sumber sekunder. Dalam penelitian ini kritik ekstern tidak perlu dilakukan sebab keaslian bahan atau materi yang digunakan, tidak diragukan. Akan tetapi yang perlu dilakukan adalah kritik intern, sebab kebenaran sumber data masih diragukan.

Guna mencari sumber-sumber tertulis penulis menggunakan data historis yang didapat melalui dokumen-dokumen berupa literatur yang ada di perpustakaan yang berbentuk buku. Sesuai dengan metode yang digunakan, maka penulis banyak menggunakan buku-buku yang berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan serta menafsirkan gejala-gejala untuk diinterpretasikan guna mendapatkan generalisasi. Pada dasarnya studi kepustakaan ini merupakan cara untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Adapun sumber-sumber tertulis tersebut di dapat di Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, Perpustakaan Daerah, dan Perpustakaan Sonobudoyo. Dengan demikian dapat memberikan informasi yang terperinci.

Tahap ketiga, Interpretasi setelah kebenaran dan keaslian sumber dipandang telah menjamin kemudian dilakukan interpretasi atau penaksiran. Interpretasi yaitu menafsirkan fakta, fakta yang telah diuji kebenarannya, yang kemudian dari fakta yang ada digabungkan menjadi satu sehingga diperoleh rangkaian peristiwa sejarah yang bermakna.

¹⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta, Yayasan Bentang Budaya, hal. 99

Tahap keempat, Rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses.¹⁸ Penulisan sejarah (historiografi) tidak lepas dari sumber-sumber sejarah yang berkaitan didalamnya, yang memberikan suatu peristiwa. Dalam penulisan sejarah aspek kronologis suatu peristiwa sangat penting, sehingga dengan mudah memberi suatu pengertian dasar kapan peristiwa itu terjadi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan histories, sosial, ekonomi dan politik. Peranan Divisi Siliwangi dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan RI yang didasari oleh semangat perjuangan dan rela berkorban yang tinggi serta dibarengi loyalitas yang tinggi, serta jujur dan disiplin dalam melaksanakan tugas, akhirnya bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan dan berhasil menegakkan negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila.

Seseorang yang ingin menulis tentang masa lampau menggunakan pendekatan historis. Menurut Louis Gottschalk history merupakan masa lampau manusia.¹⁹ Dalam penulisan skripsi ini pendekatan histories digunakan untuk mengetahui sejarah perjuangan bangsa Indonesia di dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan RI dan sejarah dibentuknya Divisi Siliwangi sebagai wujud perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Republik Indonesia dari kehancuran.

¹⁸ Louis Gottschalk, *op. cit.* hal. 32

¹⁹ *Ibid*, hal. 27

Pendekatan sosial digunakan untuk menguraikan dan menjawab permasalahan yang ditinjau dari keadaan sosial masyarakat Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan dan keadaan sosial masyarakat Jawa Barat yang pada waktu itu harus mematuhi hasil-hasil perjanjian Renville, mereka harus meninggalkan daerah Jawa Barat menuju ke daerah hijrah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagian dari mereka harus hidup mengembara ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pendekatan ekonomi digunakan untuk melihat keadaan ekonomi masyarakat Indonesia dan masyarakat Jawa Barat pada masa perjuangan kemerdekaan.

Pendekatan politik digunakan untuk menguraikan dan menjawab permasalahan yang ditinjau dari peranan Siliwangi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, peranan Siliwangi dalam menegakkan dan mengamankan Pancasila serta keberhasilan Siliwangi dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan sosial dan politik dilihat dari peranan dan perjuangan Divisi Siliwangi dalam membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan dan menegakkan NKRI.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi tentang Peranan Divisi Siliwangi dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan RI tahun 1946-1949 mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I menguraikan tentang pendahuluan secara garis besar memuat latar belakang masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, pendekatan dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II menguraikan tentang latar belakang dan bagaimana terbentuknya Divisi Siliwangi. Terbentuknya Siliwangi tidak terlepas dari sejarah Prabu Siliwangi, karena nama pengenalan Divisi Siliwangi diambil dari sejarah Keprabuan Siliwangi.

Bab III menguraikan tentang peranan Divisi Siliwangi dalam Penumpasan Pemberontakan Terhadap RI. Selain itu membahas peranan Divisi Siliwangi dalam menegakkan dan mengamankan Pancasila, peranannya dalam menumpas PKI di Madiun, dan peranan Divisi Siliwangi dalam menanggulangi agresi militer Belanda k I dan II.

Bab IV menguraikan tentang sebab-sebab Divisi Siliwangi mengosongkan daerah basisnya di Jawa Barat. Selain itu juga membahas Persetujuan Renville yang harus dipatuhi oleh Divisi Siliwangi, serta agresi militer Belanda II yang menggerakkan Siliwangi kembali ke Jawa Barat.

Bab V merupakan bab kesimpulan. Dalam bab ini disajikan tentang kesimpulan pembahasan yang dilakukan dalam bab II, III dan IV. Penulisan pendahuluan dalam penelitian ini dari uraian diatas dapat diamati melalui penelitian ini, penulis ingin membuat tulisan tentang latar belakang dibentuknya Divisi Siliwangi, Peranan Divisi Siliwangi dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan RI, dan dampak dari persetujuan Renville serta agresi militer Belanda II terhadap Divisi Siliwangi.

Demikianlah bab pendahuluan dalam penelitian ini. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa inti dari penelitian ini penulis ingin membuat suatu tulisan dengan menguraikan Peranan Divisi Siliwangi dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan RI tahun 1946-1949. Untuk pembahasan permasalahan-permasalahan yang ada akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.



BAB II

LATAR BELAKANG DAN PROSES TERBENTUKNYA DIVISI

SILIWANGI 1946-1949

A. Latar Belakang Terbentuknya Divisi Siliwangi

TNI-AD kita buat diwilayah Jawa Barat, telah menjelmakan dirinya sebagai perwujudan daripada hasrat dan tekad warga Jawa Barat guna mengisi, menegakkan dan selanjutnya mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dibidang bersenjata. Divisi Siliwangi menjelmakan diri secara serta merta dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Sejak dan mulai tanggal 20 Mei 1946 TNI-AD di Jawa Barat ini memakai nama SILIWANGI sebagai nama pengenalnya. Divisi Siliwangi ini bukan lahir pada tanggal 20 Mei 1946! Pada tanggal 20 Mei 1946 Divisi Siliwangi dilahirkan kembali. Sebabnya ialah karena rakyat warga Jawa Barat telah memiliki tradisi militer yang telah panjang usianya.²⁰

Pendahulu Divisi Siliwangi adalah pasukan-pasukan bersenjata warga Jawa Barat yang dibentuk, disusun, bergerak di Jawa Barat sebelumnya. Dimahkotai oleh tradisi dan aspirasi masa lampau perihal ke-Tuhanan yang Mahaesa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan

²⁰ Sedjarah Militer Kodam VI Siliwangi, *Siliwangi Dari Masa ke Masa Jilid I*, Jakarta, Fakta Mahjuma, 1968, hal. 4

pengejawantahan daripada segala acuan paduan gembleran pengalaman dalam kehinanestapaan dalam alam penjajahan.²¹

Kondisi perjuangan masa itu memberikan kesempatan yang positif untuk langsung ikut serta memikirkan dan ikut melakukan hal-hal yang mengenai strategi nasional, strategi militer, pembinaan sosial politik, pembinaan daerah, apalagi penegakan identitas perjuangan. Tetapi kondisi masa itu pula tidak memungkinkan gagasan-gagasan itu selalu dapat dipraktekkan, namun pada posisi-posisi tugas kemudian akan dapat diajukan. Intinya adalah bahwa misi perjuangan kita dengan mengingat kondisi dan posisi tentara yang diproseskan oleh perjuangan, membawakan identitas pembina territorial, pembina wilayah dalam arti bumi dan masyarakatnya untuk menjadi landasan pertahanan dan pembangunan.²²

Adalah keyakinan saya, mengingat pengalaman-pengalaman selama itu, bahwa dalam rangka pertahanan rakyat total, perlu suatu inti ketentaraan yang bermutu, harus diakhirinya adanya pasukan-pasukan partikelir. Karena itulah maka dalam membangun Divisi III/TKR/TRI dahulu saya usahakan peleburan satuan-satuan perjuangan, untuk seterusnya “dirasionalisasi”, dalam arti diefektifkan susunan dan persenjataannya. Proses ini belum selesai, waktu Divisi I lahir, dan dalam ruang lingkup seluruh Jawa Barat, usaha itu semakin mendesak, karena Divisi I-lah yang dipertanggungjawabkan untuk mempertahankan de facto Republik di Jawa Barat. Saya membawahi 4 Brigade, yakni Brigade I Banten, Brigade 2 Bogor, Brigade 3 Jakarta dan Brigade 4 Priangan, tanpa Tasikmalaya-

²¹ Disjahdam VI/Siliwangi, *op. cit.*, hal.9

²² A.H.Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid I Kenangan Masa Muda*, Jakarta, Cv Haji Mas Agung, 1990, hal. 259

Ciamis. Masing-masing Brigade mengandung 2-4 resimen. Di samping itu masih ada berbagai badan perjuangan bersenjata, seperti Hisbullah, Pesindo, BPRI, Barisan Banteng dan Lasykar Rakyat. Semua resmi atau merupakan “tentara” dari partai politik, berturut-turut Masyumi, Partai Sosialis, BPRI, PNI dan kelompok Tan Malaka. Proses mententerakan berjalan terus di Priangan. Badan-badan perjuangan dilantik menjadi Resimen Perjuangan.²³

Putusan Presiden untuk memberikan panji dan nama kepada tiap divisi, amat membantu kepentingan rasa serumpun ini. Satu peleton Siliwangi ke Jogja untuk menerima Panji Siliwangi dari tangan Presiden. Pada tanggal 20 Mei 1947 Panji Siliwangi diperkenalkan secara resmi kepada umum dalam suatu parade perayaan ulang tahun Siliwangi di alun-alun Tasikmalaya. Diciptakanlah emblem Siliwangi, untuk tiap seragam prajurit, yang berpusat kepada kepala macan di atas dasar putih, sehingga di waktu-waktu itu ada yang menyebutnya “macan putih”. Di tahun 50-an dasar putih itu diganti menjadi hijau. Di tahun 1945 Divisi III memelopori mengganti gelar Komandan Divisi, menjadi Panglima Divisi. Pada tahun 1946 Divisi Siliwangi memelopori pemakaian kata “korps” untuk rumpunnya. Sampai kini tetap berlaku dalam Siliwangi, di mana selalu dikedepankan semangat korpsnya.²⁴

B. Proses Pembentukan Divisi Siliwangi

Divisi Siliwangi adalah divisinya rakyat Jawa Barat yang tumbuh dari haribaan warga Jawa Barat. Diasuh dan dibina oleh warga Jawa Barat sendiri,

²³ *Ibid*, hal. 260

²⁴ *Ibid*, hal. 261-262



bagaikan maung dengan rimba belukar. "Siliwangi" diresmikan menjadi nama organisasi atau susunan militer buat Jawa Barat sejak tanggal 20 Mei 1946. Pemberian nama itu diilhami oleh kebesaran Jawa Barat di masa lampau di mana Prabu dan keprabuan Siliwangi beroleh ketenaran. Sejarah Divisi Siliwangi tidak dapat dipisahkandari sejarah proklamasi 17 Agustus 1945 dari rakyat Indonesia. Jatuh banggunya Divisi Siliwangi bertautan dengan jatuh banggunya proklamasi 17 Agustus 1945. Bukankah proklamasi itu induk segala induk dan jiwa daripada Divisi Siliwangi?

Divisi Siliwangi itu lahir sebagai akibat daripada proklamasi rakyat Indonesia, seperti halnya divisi-divisi lainnya di berbagai tempat di wilayah Tanah Air. Dilahirkanlah sebagai suatu keharusan yang tidak boleh tidak harus ada. Pendahulu Divisi Siliwangi ialah pasukan-pasukan bersenjata warga Jawa Barat sebelumnya. Dimahkotai oleh tradisi dan aspirasi masa lampau perihal ketuhanan yang Mahaesa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan pengejawantahan daripada segala acuan paduan gemblengan pengalaman dalam kehinanestapaan dalam alam penjajahan.

Siliwangi, bagi warga Jawa Barat nama itu merupakan kunci pembuka perbendaharaan kenangan dan harapan tentang kejayaan dan pengharapan-pengharapan baik mengenai masa silam, kini, dan masa datang. Betapa tidak, Siliwangi buat masa lampau, merupakan nama yang dikeramatkan karena menyangkut kebesaran, keagungan dan kejayaan suatu Keprabuan di masa silam

yang oleh warga Jawa Barat dibangga-banggakan, diagung-agungkan dan dikeramatkan karena kesemarakannya. Siliwangi buat masa kini merupakan nama yang dikeramatkan karena merupakan nama yang menyangkut kebesaran, keagungan dan kejayaan Bhayangkari kampung halaman dan warga Jawa Barat yang oleh setiap warga Jawa Barat yang baik, dibangga-banggakan, diagung-agungkan, disayangi karena amal perbuatannya dalam rangka usaha mensukseskan Proklamasi dan Revolusi 17 Agustus 1945. Mewujudkan amanat penderitaan rakyat Indonesia, menyusun masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

1. Badan Keamanan Rakyat Jawa Barat Dibentuk

Badan Keamanan Rakyat ini disahkan oleh pemerintah pada tanggal 30 Agustus 1945. Badan ini bukan tentara akan tetapi adalah sebuah badan atau Korps Pejuang Bersenjata, dengan tujuan untuk menjamin ketenteraman umum. BKR ini merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang pusatnya didirikan pada tanggal 20 Agustus 1945.

Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memilih presiden, wakil presiden, dan menetapkan Undang-undang Dasar yang sekarang dikenal dengan nama UUD 1945. Tanggal 19 Agustus 1945 disetujui pembentukan Kabinet Presidensial, terdiri dari 12 departemen. Salah satu diantaranya adalah Departemen Keamanan Rakyat. Tetapi menteri Keamanan Rakyat belum ditentukan pada waktu itu. Dalam sidang pada tanggal 19 Agustus 1945 itu PPKI membicarakan pembentukan tentara

kebangsaan. Dalam sidang berikutnya, dan pada tanggal 23 Agustus 1945 diumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR), sebagai bagian dari badan penolong keluarga korban perang (BPKKP).²⁵

PETA dibubarkan, banyak senjata yang sudah ditarik Jepang. Tetapi personelnnya dengan kemampuan militer dan semangatnya membangun PETA. Komandan kompi (*Cudanco*) dan komandan Peleton (*Sodanco*) tidak bisa dihapus. Pada hari dimana mereka dibubarkan, mereka percaya pada kenyataan dan membangun pasukan. Dari sini mereka memberikan kontribusi yang besar dalam militer Indonesia. Tetapi pada saat-saat tertentu, seperti banyak pemuda yang lain, mereka khawatir dan tidak terorganisasi serta menunggu munculnya seorang pemimpin. Inisiatif itu datang dari senior mereka. Orang-orang ini memiliki idealisme yang jelas tentang apa yang mereka inginkan mengenai tentara dan rekrutmen anggota baru meliputi Seinendan dan mantan Heiho serta pemuda lain yang tergabung dalam BKR.

Di Bandung formasi BKR pada level Karesidenan dimulai pada 20 Agustus malam dengan rapat anggota PETA dan memberikan penjelasan rencana pemerintah oleh Otoiskandardinata dan Kasman Singodimejo. Pada rapat ini para komandan battalion PETA disetujui mengorganisasi BKR di lima cabangnya di Jawa Barat. Aruji Kartawinata dan Sutamaksana ditugaskan di Priangan. Pilihan terhadap komandan Batalion mengorganisasi BKR membuat konsep

²⁵ Disjahdam VI/Siliwangi, *op. cit*, hal. 11

kepemimpinan nasional pada badan tersebut jelas. Struktur BKR diputuskan sebagai berikut:²⁶

- a. Enam orang komite pengawas, termasuk residen baru (Paradirejo), Kepala Polisi Priangan (R. Jusuf) dan walikota Bandung (R. Ating Atma Dinata).
- b. Pimpinan umum dibagi menjadi:
 - Eksekutif Komite, Aruji sebagai pimpinan. Sutamaksana sebagai wakil pimpinan dan Ukar Bratakusumah, Dr Djunjunan dan R. M. Suparto (kepala polisi kota) sebagai anggota.
 - Anggota umum termasuk China dan Arab.
- c. Administrasi
- d. Bagian pasukan diketuai oleh Komandan Kompi Sukanda Bratamenggala.

Pada akhirnya mereka di bawah KNI Karesidenan. Kolaborasi ini, menyebabkan BKR Priangan hanya praktis beroperasi pada bagian pasukan. Kenyataannya BKR menjadi barisan keamanan sipil daripada tentara. Hal itu menyebabkan BPKKP berupaya untuk tidak hanya mengatasi masalah sipil tetapi menjaga kemungkinan kegagalan kemerdekaan Indonesia. Hal itu bermaksud agar kelompok lain tidak merasa disisihkan. Pada 3 September BKR untuk Kabupaten Bandung dibentuk. Bertempat di kantor Kabupaten dengan Komandan PETA sebagai kepalanya.

²⁶ R. W. Smail, *Bandung in The Early Revolution 1945-1946*, New York, Southeast Asia Program Departemen of Asian Studies, 1946, hal. 46-47.

Pemuda-pemuda bekas Tentara Pembela Tanah Air (PETA), Heiho dan lain-lain banyak yang mendaftarkan diri menjadi anggota BKR. Tetapi tidak semua pemuda menyetujui pembentukan itu. Mereka menghendaki agar dibentuk sebuah tentara nasional. Golongan yang tidak setuju itu kemudian membentuk badan-badan perjuangan. Umumnya mereka adalah pemuda-pemuda yang sudah tergabung dalam organisasi-organisasi bawah tanah pada masa pendudukan Jepang, atau yang berafiliasi kepada aliran (politik atau agama) tertentu. Di Jakarta berdiri Komite Van Aksi yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA), dan Barisan Buruh Indonesia. Di Bandung terbentuk Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (P3I), di Jawa Tengah Angkatan Muda Indonesia (AMI), dan di Jawa Timur Pemuda Republik Indonesia (PRI). Di Aceh berdiri Angkatan Pemuda Indonesia (API), dan Barisan Pemuda Indonesia (BPI), di Sumatra Barat, Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI), dan Pemuda Republik Indonesia; di Sumatra Selatan terbentuk Pembela Keamanan Rakyat (PKR). Di Kalimantan dan Sulawesi terbentuk Pemuda Nasional Indonesia (PNI) dan badan-badan perjuangan lainnya seperti di Jawa dan Sumatra.

Pada tanggal 10 November 1945 badan-badan perjuangan tersebut menyelenggarakan kongres di Yogya, dihadiri 332 orang utusan mewakili 30 organisasi. Kongres itu melahirkan Badan Kongres Pemuda Indonesia. Ketika pada bulan November pemerintah mengizinkan berdirinya partai-partai politik, maka partai-partai membentuk pula laskar-laskar. Pada waktu itu sebenarnya sudah ada Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Tentu tidak semua badan-badan

perjuangan bersedia melebur diri ke dalam TKR, sebaliknya menjadi anak dari partai-partai politik yang terbentuk.

Badan Keamanan Rakyat adalah sekedar dibentuk selaku korps atau badan bantuan setempat untuk menjamin ketenteraman umum, jadi bukan tantara. Boleh dikatakan, bahwa Badan Keamanan Rakyat itu, menurut ketentuan-ketentuan pembentukannya, dapat disejajarkan dengan peranan suatu badan kesosialan atau paling jauh "HANSIP". Akan tetapi tidaklah dapat dipungkiri, bahwa dalam perjalanan sejarahnya, badan ini telah menduduki peranan yang tiada taranya dalam masanya. Ia menampung semangat dan hasrat keperajuritan rakyat Indonesia yang meluap-luap, berjuang menegakkan dan mengisi proklamasi. Ia menjadi pendahulu atau embrio dari pada Tentara Kebangsaan Indonesia yang kemudian dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945.

Dalam Badan Keamanan Rakyat serta segala macam kegiatannya itu, tersedia lapangan dan kesempatan buat lahirnya pemimpin-pemimpin, komandan-komandan tentara, secara segar dan wajar, tumbuh secara demokratis menurut bakat pembawaannya masing-masing, langsung dari haribaan pengalaman masyarakat yang berjuang untuk tetap merdeka. Ia menjadi badan-badan revolusi, memimpin dan memelopori perebutan kekuasaan politik dan militer dalam rangka usaha mengisi Proklamasi. Ia memimpin dan memelopori perjuangan melawan usaha-usaha pihak kolonial yang hendak kembali berusaha menjajah Indonesia.

Pada tanggal 23 Agustus 1945 rakyat Indonesia mendengarkan pidato Presiden Sukarno yang antara lain berbunyi:

"Badan Keamanan Rakyat"

Selain daripada itu kami telah memutuskan untuk mendirikan dengan segera di mana-mana "Badan Keamanan Rakyat" untuk mendapat keamanan yang seteguh-teguhnyanya. Banyak sekali tenaga-tenaga yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan ini. Bekas prajurit PETA, bekas prajurit Heiho, bekas prajurit Pelaut, pemuda-pemuda yang penuh dengan semangat pembangunan, mereka semua adalah tenaga-tenaga yang baik untuk pekerjaan ini. Menjelmakan kemauan dan cita-cita seluruh bangsa. Untuk menyusun negara yang akan menghadapi dunia internasional, karena itu saya mengharap kepada kamu sekalian hai prajurit-prajurit bekas PETA, Heiho dan Pelaut beserta pemuda-pemuda lain untuk sementara waktu masuklah dan bekerjalah dalam Badan Keamanan Rakyat.²⁷

Maka bermunculanlah di mana-mana Badan Keamanan Rakyat yang dibanjiri oleh patriot-patriot Indonesia yang memenuhi seruan Presidennya itu, guna selanjutnya berjuang di samping dan bahu-membahu dengan Komite Nasional setempat. Demikian pula keadaannya di Jawa Barat. Juga di sini, sebagaimana di bagian-bagian lain dari Tanah Air Indonesia, warganya sudah matang untuk berevolusi. Patriot-patriot membanjiri kantor-kantor pendaftaran Badan Keamanan Rakyat buat berjuang, mengisi dan menegakkan Proklamasi. Buat berevolusi bahu-membahu dengan saudara-saudara sebangsa, se-Tanah Air, sebagaimana dihiikmahkan oleh "Sumpah Pemuda" pada tanggal 28 Oktober 1928. Kematangan warga Jawa Barat buat berevolusi dapat kita saksikan antara lain pada peristiwa pemberontakan melawan penjajahan asing.

Badan Keamanan Rakyat itu bukanlah tentara daripada negara Republik Indonesia akan tetapi hanya sekedar dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari pimpinan negara pada waktu itu dan tidak dilegalisasikan menjadi salah satu unsur alat bersenjatanya. Akan tetapi, tepat

²⁷ Disjahdam VI/Siliwangi, *op. cit.* hal. 14

sekali apa yang dikatakan Shakespeare: "What is in a name?" Ya, apakah soalnya nama? Badan Keamanan Rakyat tidak sempat memperoleh kemegahan nama sesuai dengan sepak terjangnya. Sesuai dengan situasi pada masanya, BKR oleh pimpinan negara dalam ketentuan-ketentuan mengenai pendiriannya, sekedar diselipkan sebagai anak organisasi daripada suatu Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang para pemimpinnya, "harus menjalankan pekerjaannya dengan sukarela". Sedangkan tugas kewajibannya ialah "memelihara keamanan bersama-sama rakyat dan jawatan-jawatan negeri yang bersangkutan".

Dengan demikian kaburlah sifat dan hakekatnya sebagai suatu susunan tentara resmi negara yang berada dalam masa-masa penyusunan dirinya. Oleh karena itu, karena ketiadaan legalitas yuridis formil, organisasi ini dan pejuang-pejuang yang bergerak di bawah panji-panjinya telah terlupakan oleh keadilan yuridis formil berupa penghargaan-penghargaan resmi dari Negara yang bersifat "administratif". Tiada tanda-tanda jasa yang dianugerahkan kepada mereka-mereka yang kehilangan, ditinggalkan gugur dalam medan bhakti menjalankan tugas kewajibannya. HANSIP yang bukan suatu susunan tentara, telah memperoleh ketentuan administratif pengangkatan menjadi Perajurit Dua Anumerta apabila gugur dalam menjalankan tugas, dengan konsekwensi hak-hak tertentu bagi mereka-mereka yang kehilangan, ditinggalkan gugur di medan bhakti menjalankan kewajibannya.

Pada dasarnya nama Badan Keamanan Rakyat itu dapat dengan teguh kita tafsirkan sebagai suatu nama samaran daripada nama susunan tentara kebangsaan kita sesuai dengan tuntutan situasi internasional yang ada pada waktu itu. Bila kita

perhatikan formulasi tugas kewajiban Badan Keamanan Rakyat yang berbunyi “memelihara keamanan bersama-sama rakyat dan jawatan-jawatan negeri yang bersangkutan”, maka hal itu dapatlah kita artikan sebagai tugas kewajiban Bhayangkari Rakyat, bangsa dan negara Indonesia terhadap kemungkinan-kemungkinan bahaya dari luar negeri. Sebabnya ialah karena pada waktu itu masalah keamanan dalam negeri bukanlah menjadi suatu masalah bagi negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang muda belia itu yang mendapat dukungan sepenuhnya dari rakyatnya.

Dalam periode “pemindahan kekuasaan” alias perebutan kekuasaan atau ambil alih kekuasaan daripada periode Revolusi Fisik kita, kita akan menyaksikan dengan rasa bangga dan keharuan yang dalam, bahwa Badan Keamanan Rakyat itu bahu-membahu dengan Komite Nasional serta rakyat telah menerjunkan diri ke medan laga, menegaskan dan mengisi Proklamasi itu dengan kegigihan, dengan determinisme, dengan élan berjuang dan berkorban yang tiada taranya. Setelah pengalaman-pengalaman kegagalan perjuangan militer itu, sadar atau tidak sadar, perjuangan bangsa kita telah beralih haluan ke bidang perjuangan politik dengan terbitnya fajar periode yang lazim kita sebut dengan periode “Kebangkitan Nasional” dengan dipelopori oleh lahirnya Budi Utomo yang memunculkan organisasi-organisasi politik yang memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Tanah Air melalui cara-cara politik. Peranan historis daripada perjuangan-perjuangan politik organisasi-organisasi politik itu, yang utama adalah.²⁸

²⁸ *Ibid*, hal.16

- a. Melahirkan pimpinan-pimpinan politik nasional.
- b. Melahirkan kesadaran satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air yang diikrarkan sebagai “Sumpah Pemuda” pada tahun 1928.
- c. Melahirkan landasan idiil perjuangan nasional semesta yang kita kenal sebagai Pancasila yang dipaparkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945.

Kesadaran nasional rakyat dan bangsa Indonesia mencapai puncak kematangannya pada masa penjajahan Jepang. Dan pada masa penjajahan Jepang ini pulalah daya-mampu militer rakyat dan bangsa Indonesia bangkit kembali. Kedua-duanya itu dijalin oleh landasan idiil Pancasila yang terungkap di masa penjajahan Jepang pula. Kesadaran Nasional dan landasan idiil nasional lahir oleh perjuangan di bidang politik sedangkan daya mampu militer terbangun oleh mereka-mereka yang akan ditakdirkan untuk menjadi “kaum militer” kelak di dalam alam Indonesia merdeka. Itulah sebabnya mengapa tentara kita disebutkan lahir dari bawah. Lahir serta-merta dari haribaan rakyat Indonesia yang berjuang untuk menegakkan dan mengisi Proklamasi di dalam tubuh Republik Kesatuan Indonesia.

Kematangan politik dan militer itu tercapai dengan lantaran penjajahan Jepang dan bukan karena “berkahnya” Jepang, melainkan karena Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan melalui penjajahan Jepang yang kasar dan kejam itu sebagai lantarannya. Manfaat atau peranan histories daripada perang penjajahan dan invasi kerajaan Jepang di Indonesia buat usaha-usaha kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut:

Mesin perang penjajahan kerajaan Jepang telah membangkitkan kesadaran kebangsaan yang meluas di kalangan rakyat Indonesia. Kerajaan Jepang ini, di samping kebangkitan Turki Muda di bawah pimpinan Kemal Pasha alias Kemal Ataturk, semenjak kejayaannya yang gemilang atas agkatan laut Rusia dalam suatu pertempuran laut di Teluk Tsushima pada tanggal 27 Mei 1950, telah dianggap sebagai “fajar dari dunia Timur” atau sebagai suri tauladan bagi dunia Timur oleh bagian tokoh-tokoh pergerakan politik Indonesia. Kerajaan Jepang ini, dalam rangka persiapan dan usaha penjajahannya telah melancarkan propaganda yang bertemakan mengkobarkan rasa dan kesadaran nasional yang anti kulit putih. Demikian pula halnya mengenai Indonesia. Menjelang invasinya ke Indonesia, Radio Tokio dalam siaran-siarannya yang khusus ditujukan kepada Indonesia, telah menyelenggarakan siaran-siaran yang bersifat propaganda yang berthemakan membangkitkan rasa dan kesadaran nasional yang diakhiri dengan mengumandangkan lagu Kebagsaan Indonesia Raya. Dengan demikian mereka ingin menempatkan kerajaan dan bangsa Jepang sebagai “juru selamat” sebagai pelindung, pemimpin, dan cahaya Asia.

Untuk melaksanakan siasat umum Kerajaan Jepang dalam bidang militer itu, maka rakyat Indonesia harus memiliki daya mampu militer yang sanggup membantu dengan penuh semangat usaha-usaha perlawanan balatentara Jepang terhadap tentara Sekutu di bumi Indonesia. Rencana Jepang adalah untuk mengobarkan perang rakyat semesta Indonesia di bawah pimpinan Jepang terhadap pihak Sekutu. Jadi balatentara Jepang itu dijadikan tulang punggung dengan di Bantu oleh PETA dalam perang sedaerah-daerah. Untuk mencapai itu,

maka daya mampu militer rakyat Indonesia harus memiliki landasan cita-cita kebangsaan. Maka dari itu, rezim penjajahan Jepang membentuk Tentara Sukarela “Pembela Tanah Air” yang kemudian terkenal dengan nama Tentara PETA, sesuai dengan undang-undang/Osamu Seirei No. 44 tertanggal 3 Oktober 1943 yang dikeluarkan oleh Saiko Sikikan, Letnan Jenderal Kumakitji Harada, tentang “Pembentukan Pasukan Sukarela untuk membela Tanah Jawa.”

PETA ini dibentuk oleh Jepang berdasarkan gagasan seorang putera Jawa Barat yang bernama Gatot Mangkupraja. Pada tanggal 17 September 1943 Gatot Mangkupraja telah mengajukan surat permohonan kepada Gunseikan dan Saiko Sikikan mengenai pembentukan “Barisan Sukarela untuk membela Tanah Air”. Permohonannya itu ternyata mendapat sambutan yang hangat dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia, sehingga dikeluarkanlah oleh pihak Jepang Osamu Seirei No. 44 tersebut di atas. Dalam waktu yang amat singkat di mana-mana berdirilah pasukan-pasukan PETA yang oleh rakyat dapat dilihat sedang mengadakan latihan-latihan menggunakan senjata yang sebenar-benarnya di bawah pimpinan perwira-perwira Indonesia. Secara tidak langsung hal ini telah menumbuhkan rasa harga diri rakyat Indonesia. Berbeda dengan KNIL pada masa penjajahan Belanda sebelumnya, maka PETA bentukan rezim penjajahan Jepang itu, sesuai dengan rencana siasat perang Jepang sendiri, dengan jelas-jelas diberi dasar-dasar kebangsaan dan di dalam pendidikannya unsur semangat mendapat tempat yang utama sekali. Zen Amar, dalam karyanya yang berjudul “Bandung Lautan Api” antara lain menulis tentang PETA itu sebagai berikut:

Pokok pikiran mendirikan PETA itu ialah:²⁹

- a. Para serdadu Jepang dapat mengkhususkan diri pada tugas tempur.
Para pemuda Indonesia dapat membantu di bidang keamanan.
- b. Atas usul inisiatif Kapten Yanagawa, kepala Shambhoo Beppan (intelijen), maka di Tangerang dibuka sebuah tempat pendidikan dengan nama Seinen Dojo, untuk mendidik pemuda-pemuda Indonesia menjadi "Home Guard".
- c. Untuk dididik menjadi Daidanco, dipilih tokoh-tokoh agama dan orang-orang terkemuka dalam masyarakat, sedangkan untuk dididik menjadi Cudanco dan Syoodanco diambil pemuda-pemuda dari sekolah lanjutan tingkat atas dan pertama.

Pembentukan PETA oleh Jepang dimaksudkan untuk dipergunakan mempertahankan wilayah Jawa terhadap serangan tentara Sekutu. Sistem pertahanan yang digunakan Jepang ialah sebagai berikut:

Pertahanan disusun dengan tiga lini. Lini terdepan, di pantai, terdiri atas kesatuan-kesatuan Indonesia. Dengan demikian maka merekalah yang akan menerima pukulan pertama dari pihak Sekutu dalam serangan balasannya. Lini kedua terdapat di gunung-gunung di mana kelompok-kelompok tentara Jepang dan Indonesia akan melaksanakan sistem perang gerilya. Di samping "Home Guard" (PETA), pihak Jepang telah membentuk Heiho (pembantu serdadu Jepang) yang dikerahkan ke front-front terdepan. Pemuda-pemuda Indonesia yang masuk Heiho banyak yang dikirim ke medan pertempuran Ternate, Birma dan

²⁹ *Ibid*, hal.19

Siam. Mereka ditugaskan dalam kesatuan-kesatuan artileri, perlengkapan, angkutan dan jawatan-jawatan lainnya, bahkan di berbagai kesatuan ada yang praktis sepenuhnya dilaksanakan oleh tenaga-tenaga Heiho, di mana para bintaranya memegang jabatan-jabatan perwira. Mereka ternyata telah menunjukkan keberanian serta disiplin yang kuat di medan pertempuran.

Demikianlah keadaannya waktu itu. Seluruh lapisan masyarakat diikuti-sertakan dan dilatih dalam bidang kemiliteran, disusun ke dalam organisasi yang berdisiplin tinggi dan rapi. Dengan demikian, berbeda dengan suasana pada masa-masa penjajahan sebelumnya di mana rakyat Indonesia sama sekali dijauhkan dari suasana kemiliteran, maka pada masa penjajahan singkat dari Jepang, seluruh angkatan muda Indonesia mulai dari kota-kota besar hingga ke dusun-dusun, dilatih dalam soal-soal kemiliteran dan peperangan. Dilatih berorganisasi kemiliteran, dilatih mempergunakan senjata api, digembleng disiplin dan semangat kebangsaan

2. Pembentukan Badan Kelasykaran/Perjuangan

Ketika rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mencanangkan Proklamasinya, rakyat Indonesia telah memiliki dan tersusun menjadi daya mampu militer yang sewaktu-waktu dapat diterjunkan di medan juang karena mereka telah terlatih dalam soal-soal kemiliteran praktis serta telah tersusun rapi dalam berbagai organisasi massa yang totaliter seperti Seinendan, Keibodan, Tonari kumi, Hisbullah, Pemuda pelajar, Hookookai, Urusan kesehatan, Urusan sosial dan organisasi lain sejenisnya. Tenaga-tenaga PETA yang dilucuti rezim penjajahan Jepang pada sebelum tanggal 17 Agustus 1945 dan Heiho menjadi

tenaga intinya bersama dengan ex KNIL, pemuda-pemuda/Pelajar-pelajar, yang oleh pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia diindoktrinasi untuk hanya mentaati mereka terutama pimpinan negara RI.³⁰

Setelah Jepang mengukudeta pada 10 Oktober, dimana kasus-kasus diarahkan sebagian ke BKR, jaringan lenyap tanpa jejak. TKR, dalam gilirannya tidak teruntuk organisasi massa dengan jaringan territorial penduduk sipil, konsisten, di teori akhir pembedaan kesatuan di tentara lengkap dan diseragamkan. Di awal Oktober, pemuda-pemuda kampung Bandung sudah mulai bergabung dan ikut menyerang kantor-kantor Jepang dan pos militer. Tetapi hal ini dilakukan spontan dan tidak terorganisir, ini merupakan sebuah semangat revolusioner.³¹

Dengan adanya persiapan-persiapan tersebut di atas, maka pada saat sesudah kita memproklamasikan kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan serta-merta para pemuda, angkatan muda rakyat Indonesia, mengambil inisiatif sendiri-sendiri dalam menyambut proklamasi kemerdekaannya itu. Para angkatan muda itu mengelompokkan diri masing-masing dengan sukarela tanpa pamrih untuk dengan sukarela pula menundukkan diri kepada pribadi-pribadi tertentu di antara mereka yang menurut anggapan serta pertimbangan mereka sendiri pantas untuk dijadikan pemimpin-pemimpin mereka. Maka lahirlah pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin kelompok ini selanjutnya menyusun kelompoknya menjadi kelompok-kelompok kelasykaran dan mencari hubungan-hubungan dan menggabungkan diri kepada susunan kelompok-kelompok yang

³⁰ *Ibid*, hal. 20

³¹ R.W.Smail, *op. cit*, hal. 93

lebih besar. Maka lahirlah badan-badan kelasykaran dengan komandan-komandan kelasykaran. Mereka yang mampu memimpin perkelompokan sebesar regu, menjadi komandan regu, sebesar seksi (peleton) menjadi komandan seksi dan demikian seterusnya.

Pada umumnya yang terpilih menjadi komandan-komandan adalah bekas anggota PETA, KNIL atau Heiho. Selanjutnya badan-badan kelasykaran itu menugasi diri masing-masing dengan tugas merealisasikan Proklamasi, yakni mengisi dan menegakkan kemerdekaan negaranya yang baru saja diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu pulalah sebabnya mengapa kelompok-kelompok angkatan muda rakyat Indonesia, tua-muda, laki-laki perempuan, dengan berbondong-bondong dan serta-merta memenuhi seruan Presiden RI untuk berjuang di dalam dan dalam hubungan Komite Nasional serta Badan Keamanan Rakyat setempat-setempat, di mana mereka itu membuktikan mampu menjadikan Proklamasi 17 Agustus 1945 itu mempunyai arti, menjadi terealisasi, menjadi terisi dan tertegak.

Daya mampu militer yang dibina pada masa dan suasana serta oleh rezim penjajahan Jepang, sebagai candradimuka yang memupuk ketabahan, kepercayaan pada diri sendiri, tak kenal menyerah, semangat kebangsaan yang fanatik tak terhingga, telah disalurkan oleh proklamasi 17 Agustus yang dilandasi oleh Pancasila sebagai landasan idiilnya. Kira kira setengah juta angkatan muda Indonesia (Jawa Barat) telah menerjunkan diri ke dalam urusan revolusi. Mereka meninggalkan bangku-bangku sekolah, kantor-kantor, pabrik-pabrik, sawah-sawah dan lain-lainnya. Mereka menyusun diri dalam badan-badan kelasykaran,

menjadikan diri mereka modal proklamasi, modal revolusi yang tiada ternilai harganya. Dalam hal perjuangan (mencapai) Proklamasi, ternyata bahwa warga Jawa Barat tidak ketinggalan dari saudara-saudaranya dari tempat-tempat lainnya.

Badan-badan perjuangan atau badan-badan kelasykaran yang tercatat di Jawa Barat antara lain adalah.³²

- a. Pemuda Republik Indonesia (PRI) bermarkas di toko Ciyoda (sekarang Toko Kota Tujuh) di bawah pimpinan Suprpto. Organisasi itu semua bernama Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI) yang bermarkas di jalan Tamblong.
- b. Angkatan Pemuda Indonesia (API) cabang Bandung dibentuk oleh Astrawinata, Maulana, Wasito, Heru Sutrisno dan lain-lain. Markasnya terletak di jalan Lengkong Besar No. 74 Bandung.
- c. Lasykar Wanita Indonesia (Lasywi) dibentuk atas inisiatif Ibu Aruji Kartawinata pada tanggal 12 Oktober 1945. Anggota berjumlah kurang lebih 300 orang terdiri dari pasukan tempur, palang merah, penyelidikan dan perbekalan. Tokohnya antara lain Nona Sabariah, Nona Isbandiah, Nona Hermiati dan Suteja.
- d. Hizbullah dengan tokoh-tokohnya antara lain Kamran, Husinsyah, Utarya, Gofar Ismail dan Mokhtar. Hizbullah (tentara Allah) didirikan Desember 1944 sebagai pembantu semi militer dari Masyumi. Saat Masyumi diubah ke partai

³² Disjahdam VI/Siliwangi, *op. cit.*, hal. 23

politik pada 7 Nopember 1945, Hisbullah melanjutkan sebagai pembantu tentara dan merupakan organisasi pilihan yang terdiri atas orang yang muda yang dibentuk kekesatuan militer.

- e. Sabilillah dengan tokoh-tokohnya antara lain Isya Anshari, Ismail Napu, dan Ajengan Toha. Sabilillah merupakan organisasi massa yang terdiri dari anggota Masyumi dari segala usia, tidak begitu banyak ke organisasi militer, akibatnya seluruh orang Islam Indonesia di aspek militer.³³
- f. Barisan Berani Mati antara lain dipimpin oleh Effendi.
- g. Pemuda Indonesia Maluku (PIM) dengan tokohnya antara lain Andries, Leo Lapulisa dan G. Latumahena.
- h. Lasykar Rakyat, antara lain di bawah pimpinan Emma Bratakusumah.
- i. Pasukan Garuda Putih, di bawah pimpinan Sinaga dan lain-lain.
- j. Barisan Merah Putih (BMP) dipimpin antara lain oleh Nukman Abullah Rais, dan Nukman.

Organisasi lain muncul di babakan di periode ini, Palang Merah Indonesia bukanlah badan perjuangan. Palang Merah mempekerjakan wanita, sebagian berpendidikan, yang sangat senang dengan perjuangan. Jabatan ini, seperti Palang Merah secara umum, diorganisasi oleh orang yang lebih tua, pensiunan pembantu sipil yang memberikan obat-obatan. Stafnya wanita, termasuk beberapa anak-anaknya, semua dari mereka. Di rumah yang sama dan di area, juga mendirikan

³³ R.W.Smail, *op. cit*, hal.91

dapur umum. Dalam aktifitas ini dan dipusat dapur lainnya di seluruh Bandung, dapat dilihat dengan jelas semangat terdepan dari awal Revolusi.³⁴

Kesemua badan kelasykaran itu berjuang bahu-membahu dengan Komite Nasional Indonesia Jawa Barat dan kemudian juga dengan BKR. Maka berdirilah Badan Keamanan Rakyat (BKR) setempat-setempat di pelosok-pelosok Jawa Barat dengan pusat masing-masing buat Karesidenan Priangan Cirebon buat. Badan-badan itu menampung semangat dan hasrat patriot-patriot Jawa Barat yang menyala-nyala, yang hendak mewujudkan kehidupan masyarakat bernegara, bebas dari penindasan dan penjajahan. Berbondong-bondong mereka memenuhi tempat-tempat pendaftaran Badan Keamanan Rakyat, dari mulai kota-kota besar sampai yang paling kecil dengan tekad satu, ialah berjuang

Atas perintah Pemerintah Pusat RI maka diusahakanlah pembentukan BKR di Bandung yang pembentukannya dapat direalisasikan oleh Aruji Kartawinata dengan mengambil tempat di jalan Pasirkaliki (Gedung Sirnagalih sekarang). Tampak hadir ketika itu para ex PETA, ex KNIL, ex Heiho dari Priangan, antara lain ex Daidanco PETA, Satalaksana dan Parjaman, ex Cudanco PETA Sukanda Bratamanggala. Aruji Kartasasmita (ex Daidanco) hanya membentuk BKR Priangan saja yang dalam pelaksanaannya mendapat bantuan dari Omon Abdurahman (selaku wakilnya) Syansu, Suhari, Sumarsono dan Abdurahman. BKR Kabupaten Bandung dipimpin oleh Gandawijaya, Sukanda Bratamanggala BKR Bandung Utara, BKR kota Bandung, oleh Suhari. Kemudian datang Hidayat yang memimpin Angkatan Rikuyu Syokioku di kebon Kawung

³⁴ *Ibid*, hal. 96

yang kemudian mendapat tugas untuk mengkoordinir soal angkutan/transport seluruh BKR.

Sebagai pemuka-pemuka daripada Badan Keamanan Rakyat itu (umumnya mereka bekas perwira-perwira PETA) dapat antara lain disebut:³⁵

- a. Buat Badan Keamanan Rakyat kota Jakarta: Latif Hendradiningrat, Mu'min, Priatna, S. Kunto, Daan Yahya, Taswin, Daan Mogot.
- b. Buat Badan Keamanan Rakyat Karesidenan Jakarta: Sumarna, Aryana Prawiraatmaja, Halim dan Marwoto.
- c. Buat Badan Keamanan Rakyat Karesidenan Banten: Kyai H. Akhmad Khotib, Jayarukmantara.
- d. Buat Badan Keamanan Rakyat Karesidenan Bogor: Gatot Mngkupraja, Edi Sukardi dan D.Kosasih.
- e. Buat Badan Keamanan Rakyat Karesidenan Priangan: Aruji Kartawinata, Hidayat, Sumarsono dan Abdulrahman.
- f. Buat Badan Keamanan Rakyat Karesidenan Cirebon: Asikin, Sumarno, Rukman dan Effendi.

3. Pembentukan dan Perkembangan Tentara Nasional Indonesia di Jawa Barat

Dalam tulisan di atas kita telah menyebut-nyebut nama TKR, ialah Tentara Keamanan Rakyat. Demikianlah, pada ketika bumi pertiwi telah bermandikan darah dan keringat para pejuang Proklamasi, dalam rangka mengisi dan

³⁵ Disjarahdam VI/Siliwangi, *op. cit*, hal. 24

menegakkan Proklamasi 17 Agustus 1945, maka pemerintah pada akhirnya membentuk juga suatu tentara yang pembentukannya berdasarkan Maklumat Pemerintah tertanggal 5 Oktober 1945, yang berbunyi: Maklumat Pemerintah RI No.6 : Tentara Keamanan Rakyat dibentuk untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat. Maklumat itu kemudian disusul oleh Maklumat Pemerintah tertanggal 6 Oktober 1945 (Menteri Keamanan Rakyat) yang pertama dan berbunyi sebagai berikut:³⁶

“..... Sebagai Menteri Keamanan Rakyat diangkat Soepriyadi”

Kemudian menyusul pula pengumuman pemerintah tertanggal Jakarta 7 Oktober 1945 yang berbunyi sebagai berikut.³⁷

Ini hari telah dilakukan pembentukan Tentara Kebangsaan di salah satu daerah dekat Jakarta dengan maksud untuk menyempurnakan kekuatan RI. Pemuda-pemuda, bekas PETA, Heiho, dan pemuda-pemuda dari Barisan Pelopor telah menyiapkan tenaganya, agar setiap waktu dapat membuktikan tenaganya untuk menentang kembalinya penjajahan Belanda.

Disusul pula oleh mobilisasi Tentara Keamanan Rakyat yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Pusat, Mr. Kasman Singodimejo, tertanggal Jakarta 9 Oktober 1945 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Untuk menjaga keamanan rakyat pada dewasa ini, oleh Presiden RI telah diperintahkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Tentara ini terdiri atas rakyat Indonesia yang berperasaan penuh tanggung jawab atas keamanan masyarakat Indonesia dan guna menjaga kehormatan negara Republik Indonesia”.

Maka berakhirilah secara diam-diam Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945, tanpa pembubaran. Laksana embun pagi

³⁶ *Ibid*, hal. 29

³⁷ *Ibid*, hal. 29-30

ia berseri sebentar untuk kemudian hapus tanpa hantaran. Ia merupakan kuntum juang dan pengemban api semangat juang Proklamasi 17 Agustus 1945! Ia berjuang tanpa memikirkan untung-rugi pribadi, tanpa mengetahui pangkal pelabuhannya, ujung perjuangannya, tetapi penuh keyakinan bahwa ia harus berjuang karena perjuangannya benar. Peranan historisnya ialah berdampingan dengan Komite Nasional dan telah menjadi inti tenaga untuk memelopori gerakan perebutan-perebutan kekuasaan sipil dan militer atas nama pemerintah RI dari tangan penjajah Jepang yang telah berkapitulasi kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Bersama-sama dengan pejuang Proklamasi lainnya, BKR telah bertegak tugas menjadi Bhayangkari Negara, berjuang tanpa mementingkan diri-sendiri, menanggulangi usaha-usaha Belanda yang hendak kembali menjajah Indonesia dengan jalan membonceng kepada tentara Kerajaan Inggris beserta persemakmurannya.

Pada tanggal 20 Oktober 1945 oleh Kementerian Keamanan Rakyat diumumkan sebagai berikut.³⁸

“Telah diangkat oleh pemerintah RI pucuk pimpinan Kementerian Keamanan Rakyat, ialah sebagai berikut:

- a. Menteri ad Interim: Moehamad Soeljoedikoesoemo
- b. Pemimpin Tertinggi: Supriyadi
- c. Kepala Staf Umum: Mayor Urip Sumoharjo.

Pengangkatan Urip Sumoharjo bekas Mayor KNIL itu, tentu ada sangkut-pautnya dengan pernyataan sikap bekas-bekas opsir KNIL tertanggal Jakarta 14

³⁸ *Ibid*, hal. 30

Oktober 1945 yang menyatakan berdiri dibelakang RI serta siap sedia menjalankan perintah-perintahnya dengan segala kekuatan lahir dan batin. Untuk melaksanakan tugasnya itu, yakni membentuk tentara kebangsaan, Urip Sumoharjo diangkat menjadi kepala Staf Umum dengan pangkat Letnan Jenderal. Letnan Jenderal Urip Sumoharjo segera membentuk Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat atau MT TKR dengan mengambil kedudukan di Yogyakarta. Adapun Tentara Keamanan Rakyat itu, sebagaimana juga Badan Keamanan Rakyat, meliputi juga bagian-bagian Darat, Laut, dan Udara. Tentara Keamanan Rakyat itu dibagi dalam Komandemen-komandemen yang di dalamnya terdapat beberapa Divisi. Komandemen Jawa Barat meliputi wilayah Jawa Barat dan Jakarta Raya. Nama resmi dari Komandemen Jawa Barat adalah Komandemen I Jawa Barat dan berkedudukan di Purwakarta. Panglimanya adalah Didi Kartasasmita dengan pangkat Jenderal Mayor, sedangkan Abdul Haris Nasution, dengan pangkat Kolonel ditetapkan sebagai Kepala Stafnya. Pada mulanya Komandemen I Jawa Barat itu berkedudukan di Tasikmalaya. Akan tetapi kemudian pindah ke Purwakarta.

Di antara para Perwira Stafnya terdapat antara lain Kolonel Abdul Kadir yang kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi "Sunan Gunung Jati" di Cirebon. Selanjutnya Letnan Kolonel Hidayat Sukarmawijaya (kemudian menjadi Komandan Resimen di Bogor), Letnan Kolonel Rahmat Kartakusumah, Mayor Akhmad Sukarmawijaya, Mayor A.E. Kawilarang yang kemudian dipindahkan ke Bogor untuk menjabat Kepala Staf Resimen. Panglima Komandemen I Jawa Barat segera mengeluarkan perintah agar dibentuk 13 resimen untuk seluruh Jawa Barat

yang dalam waktu singkat terbentuk dengan susunan masing-masing resimen terdiri atas 3 atau 4 batalyon.

Resimen-resimen itu antara lain sebagai berikut:³⁹

- a. Resimen I Banten: di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kyai Syam'un.
- b. Resimen II Bogor: di bawah pimpinan Letnan Kolonel Husein Sastranegara/Hidayat Sukarmawijaya.
- c. Resimen III Sukabumi: di bawah pimpinan Letnan Kolonel Eddy Sukardi.
- d. Resimen IV Tangerang: di bawah pimpinan Letnan Kolonel Singgih.
- e. Resimen V Cikampek: di bawah pimpinan Letnan Kolonel Muffreini.
- f. Resimen VI Purwakarta: di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sumarna.
- g. Resimen VII Cirebon; di bawah pimpinan Letnan Kolonel Supardi.
- h. Resimen VIII Bandung: di bawah pimpinan Letnan Kolonel Omon Abdulrakhman.
- i. Resimen IX Pandalarang: di bawah pimpinan Letnan Kolonel Gandawijaya.

³⁹ *Ibid*, hal. 31

- j. Resimen X Garut: di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ponto Sukawijaya.
- k. Resimen XI Tasikmalaya: di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soepian Iskandar.
- l. Resimen XII Jatiwangi: di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sumarmo.
- m. Resimen XIII Sumedang: di bawah pimpinan Letnan Kolonel Umang Karyasenjaya.

Sementara itu, Markas tertinggi Tentara Keamanan Rakyat telah menyusun Komandemen I Jawa Barat dengan resimen-resimennya ke dalam 3 Divisi, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- a. Divisi I yang meliputi keresidenan-keresidenan Banten dan Bogor dengan berkedudukan di Serang, di bawah pimpinan Kyai Haji Syam'un. Kemudian, untuk sementara waktu, oleh kepala staf MT TKR diadakan Divisi XI untuk daerah Bogor di bawah pimpinan Abdul Kadir dengan pangkat Kolonel, guna akhirnya dimasukkan ke dalam Divisi II.
- b. Divisi II meliputi keresidenan-keresidenan Jakarta dan Cirebon, berkedudukan di Linggajati, di bawah pimpinan Asikin, yang kemudian diganti oleh Kolonel Abdul Kadir. Sebagaimana telah diterangkan di atas, Divisi II ini kemudian ditambah dengan susunan tentara keresidenan Bogor (ex Divisi XI), akan tetapi

⁴⁰ *Ibid*, hal. 32



kemudian dikurangi dengan susunan dari kabupaten-kabupaten Sukabumi dan Cianjur yang dimasukkan ke dalam susunan Divisi III.

- c. Divisi III meliputi keresidenan Priangan dan berkedudukan di Bandung di bawah pimpinan Aruji Kartawinata. Sebagaimana disebutkan di atas, ke dalam susunan Divisi III ini kemudian dimasukkan susunan tentara kabupaten-kabupaten Sukabumi dan Cianjur.

Badan-badan kelasykaran bersenjata itu lahir atas paksaan keadaan, lahir atau inisiatif sendiri para pemuda pejuang untuk membentuk dan menyusun diri atas inisiatif sendiri, memperlengkapi dan memperlengkapi diri sendiri, melakukan operasi-operasi dengan kemauan sendiri-sendiri. Dalam hal ini beruntunglah kita bahwa KNI dan BKR setempat pada masanya secara langsung maupun tidak langsung, berkat paksaan keadaan, sejauh kemungkinan telah mampu memberikan pengarahan atas badai semangat patriotisme yang menyala-nyala dalam dada dan hati rakyat Indonesia, pejuang-pejuang Proklamasi itu. Kemudian pemerintah menyusun Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1945. Pada hakekatnya Tentara Keamanan Rakyat itu adalah kelanjutan atau peresmian daripada Badan Keamanan Rakyat setempat-setempat menjadi Tentara Kebangsaan. Tentara Keamanan Rakyat ini pada tanggal 7 Januari 1946 menjadi Tentara Keselamatan Rakyat untuk kemudian pada tanggal 25 Januari 1946 menjelma menjadi Tentara Republik Indonesia. Dengan memakai nama "Tentara Republik Indonesia" itu, maka pada dasar atau hakekatnya, pemerintah mulai

menunjukkan sikap yang tegas dan bertekad untuk memiliki dan mengasuh tentara Kebangsannya yang akhirnya bernama Tentara Nasional Indonesia sejak tanggal 3 Juni 1947.

Mengenai susunan ketentaraan tersebut di atas di daerah Jawa Barat, hingga waktu pelaksanaan hasil-hasil pekerjaan panitia termaksud di atas, telah mengalami saat-saat yang sangat bersejarah baginya. Yang dimaksudkan di sini adalah saat-saat di “hidup”-kannya nama kebesaran “baheula” Jawa Barat menjadi nama susunan ketentaraan Jawa Barat semenjak tanggal 20 Mei 1946. Mulai tanggal 20 Mei 1946 itu, susunan ketentaraan Jawa Barat, yaitu Komandemen I Jawa Barat, telah mengambil sebagai tanda pengenalnya nama SILIWANGI. Guna mengkoordinasikan badan-badan kelasykaran baik yang bersenjata maupun tidak yang berada di luar organisasi TKR, maka pada tanggal 15 September 1945, di Bandung dibentuk sebuah badan koordinasi yang diberi nama. Markas Daerah Perjuangan Pertahanan Priangan atau MDPP Priangan, yang organisasinya membawakan:⁴¹

- a. KRIS pimpinan Lasut, seorang mahasiswa Sekolah Teknik Tinggi.
- b. PESINDO pimpinan Tobing dan Mashudi.
- c. API (Angkatan Pemuda Indonesia) pimpinan Wasito, seorang mahasiswa STT.
- d. PIM (Pemuda Indonesia Maluku) pimpinan Pellaupessy, seorang bekas pelaut “Zeven Provincien.

⁴¹ *Ibid*, hal. 37

- e. BMP (Barisan Merah Putih) pimpinan Abdul Rais.

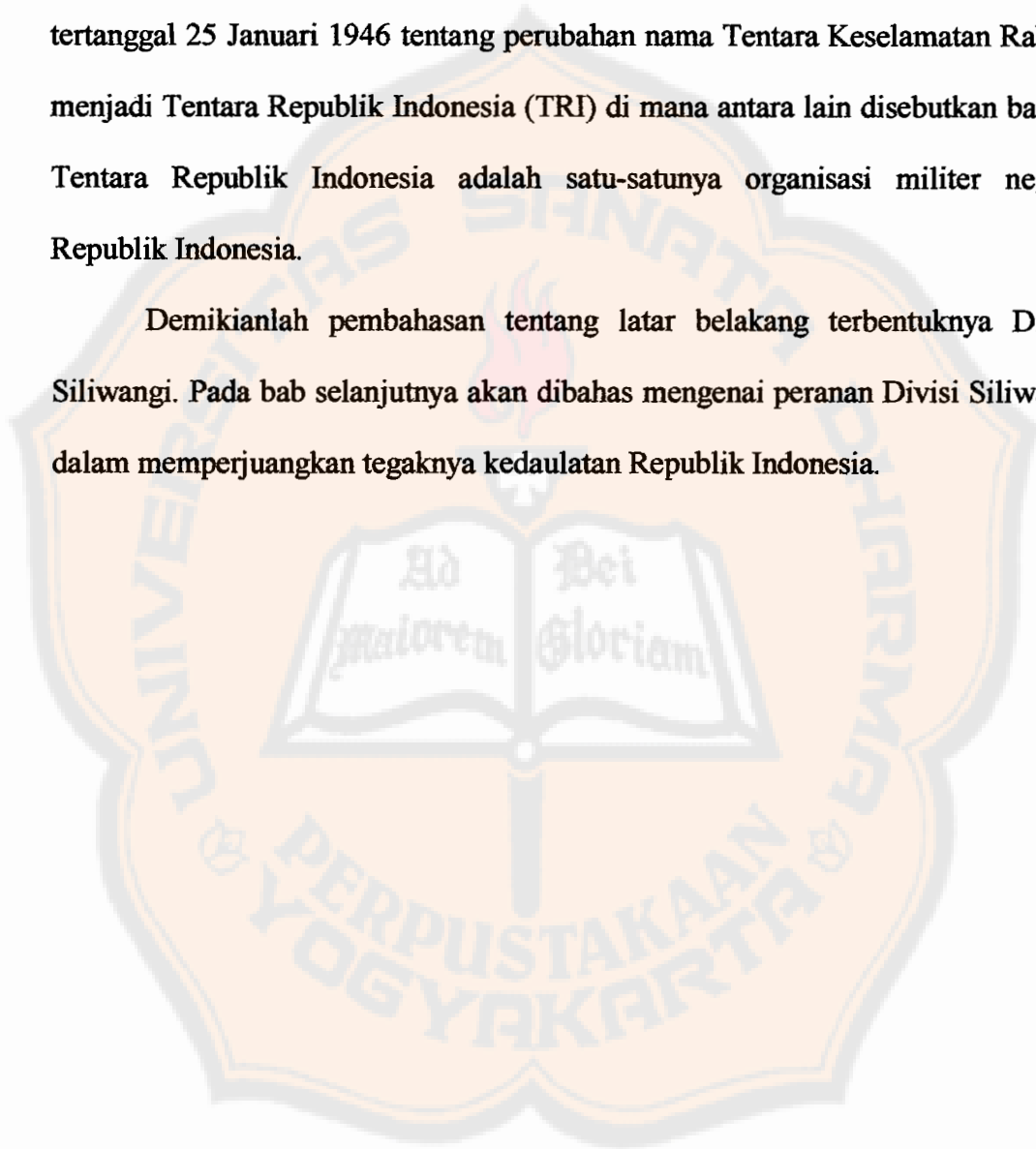
Organisasi-organisasi tersebut mempunyai azas tujuan sebagai berikut:

- a. Ke dalam: Menghubungkan diri dengan masyarakat.
- b. Ke luar: Bersama-sama dengan TKR mempertahankan negara.

Pimpinan MDPP ini berada di dalam tangan Sutoko dan taktis mereka berada di bawah Kepala Staf Divisi III. Kemudian pada tanggal 19 Desember 1945, MDPP itu barulah menjadi MPPP (Majelis Persatuan Perjuangan Priangan). Pimpinan tetap berada di tangan Sutoko dan taktis berada di bawah komando Komandan Pertahanan Bandung, yakni Letnan Kolonel Sunjono. Pada waktu itu juga pimpinan KRIS, PESINDO, PIM, dan BMP mengadakan persetujuan dengan Komandan Pertahanan Bandung secara tertulis untuk dimiliterisasikan menjadi "Detasement PELOPOR" di bawah pimpinan Mayor Tobing. Sebelumnya, yakni pada tanggal 8 Februari 1946, API Priangan yang beranggotakan kira-kira 4.000 orang, telah dilucuti senjata mereka oleh TRI, dengan maksud untuk memperkuat siasat pertempuran. Di antara pemuda bekas anggota API ini ada yang dimiliterisasikan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, pada tanggal 20 Mei 1946, Komandemen I Jawa Barat meresmikan nama "SILIWANGI" menjadi tanda pengenalnya, menjadi nama kebesarannya. Pada hakekatnya langkah itu mencerminkan usaha-usaha konsolidasi daripada daya-mampu militer Indonesia di Jawa Barat. Paling tidak, langkah itu berarti secara diam-diam telah menuju kepada peleburan ketiga divisi dari Komandemen I Jawa Barat ke dalam satu pimpinan menjadi satu komando.

Dalam pada itu, sejauh mungkin diusahakan pelbagai badan kelasykaran bersenjata ke dalamnya. Hal ini mengalami banyak kesulitan di tempat-tempat lain. Kebijakan itu tidak lain adalah untuk mentaati Maklumat Pemerintah tertanggal 25 Januari 1946 tentang perubahan nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) di mana antara lain disebutkan bahwa Tentara Republik Indonesia adalah satu-satunya organisasi militer negara Republik Indonesia.

Demikianlah pembahasan tentang latar belakang terbentuknya Divisi Siliwangi. Pada bab selanjutnya akan dibahas mengenai peranan Divisi Siliwangi dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan Republik Indonesia.



BAB III

PERANAN DIVISI SILIWANGI DALAM PENUMPASAN

PEMBERONTAKAN TERHADAP RI

1946-1949

A. Penumpasan Sisa Gerombolan Bambu Runcing di Banten Selatan

Persoalan “Dewan” di Serang di bawah pimpinan Ce Mohammad yang berusaha untuk menguasai keadaan pada tahun 1945, di saat Republik Indonesia baru saja diproklamasikan, dengan jalan terror-terror penculikan, bahkan hendak mengadakan “Coups” serta melucuti BKR setempat, akhirnya dapat ditumpas oleh BKR pada waktu itu juga. Juga persoalan “Lasykar Rakyat” yang membangkang terhadap pemerintah RI telah pula berhasil di tumpas di daerah Karawang. Kesemuanya itu tentu saja menimbulkan rasa tidak puas terhadap tindakan yang demikian drastisnya dari pihak Pemerintah RI, sehingga dengan berbagai cara oknum-oknum yang merasa kecewa itu, berusaha dengan segala daya dan upaya untuk menyusun kembali kekuatan-kekuatan untuk menentang Pemerintah RI yang sah. Bagi mereka tidaklah menjadi persoalan apakah perbuatan-perbuatan mereka itu akan merugikan rakyat atau tidak. Yang penting bagi mereka ialah tercapainya tujuan yang mereka cita-citakan.

Demikianlah pula halnya yang terjadi di daerah Banten. Di sinipun oknum-oknum yang merasa tidak puas terhadap Pemerintah RI bergabung dalam apa yang dinamakan “Bambu Runcing” yang pimpinannya antara lain dipegang oleh Khaerul Saleh dan Kilap. Tidak sedikit kerugian-kerugian yang harus diderita

baik oleh pemerintah maupun rakyat atas perbuatan-perbuatan serta petualangan-petualangan mereka. Guna menyusun kembali kekuatan mereka itu, tidak sedikit di antara pasukan-pasukan kita yang berlalu-lalang di Ciwaru, yakni pada masa Perang Kemerdekaan Kesatu, dilucuti senjatanya, justru di saat-saat kita memerlukan pemusatan segala potensi dalam menghadapi agresi militer Belanda yang pertama. Hal ini dengan sendirinya sangat merugikan perjuangan RI. Tindakan-tindakan drastis terhadap petualangan mereka itu memang waktu itu belum sempat diadakan karena sebagian besar dari satuan-satuan TNI diperintahkan untuk hijrah ke daerah RI di Jawa Tengah sebagai konsekwensi diterimanya Persetujuan Renville oleh Republik Indonesia.

Pada saat “dikosongkannya” kantong-kantong di Jawa Barat, memang ada usaha dari pasukan-pasukan yang tetap bertahan di Jawa Barat dan tidak turut hijrah itu, untuk bergabung dalam “Brigade Citarum” agar dengan demikian dapat dilakukan kerjasama dalam usaha-usaha menghadapi fihak Belanda. Dan justru di saat-saat itulah gerombolan Bambu Runcing merajalela dan mengambil sebagai daerah operasinya ialah Keresidenan Bogor dan Jakarta sebelah barat. Setelah pasukan Siliwangi ber-long March ke Jawa Barat dan tiba di kampung halamannya kembali, maka segala kegiatan gerombolan Bambu Runcing yang sangat merugikan perjuangan RI itu, harus segera dihentikan. Operasi pembersihan terhadap sisa-sisa gerombolan Bambu Runcing itu, pimpinannya diserahkan kepada Mayor Sudarsono Komandan Batalyon “Kian Santang”. Untuk keperluan tersebut telah dikerahkan kekuatan sebagai berikut.⁴³

⁴³ *Ibid*, hal. 235-236

- a. I Kompi Gabungan Batalyon “Kala Hitam” di bawah pimpinan Kapten Suripto.
- b. I Kompi Gabungan Batalyon “Suryakencana” di bawah pimpinan Letnan I Sukma.

Pada tanggal 11 Oktober 1949, dengan mengendarai 12 buah truk, Kompi Gabungan Batalyon “Kala Hitam” di bawah Kapten Suripto berangkat meninggalkan daerah Cianjur, langsung menuju Banten Selatan dengan melalui Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Cikotok dan Bayah. Kira-kira 5 kilometer lewat Bayah, gerakan dilanjutkan dengan berjalan kaki hingga Malingping untuk kemudian bermalam di sini. Semenjak subuh hari gerakan pembersihan mulai dilancarkan. Desa-desanya yang semula dikuasai oleh gerombolan Bambu Runcing sendiri selalu mundur dan menghindari pertempuran. Pasukan Kapten Suripto, tiba di kewedanan Cibaliung pada senja hari, di mana Komandan Batalyon “Kian Santang”, Mayor Sudarsono, beserta I Kompi Gabungan Batalyon I/XII “Suryakencana”, berada. Gerakan pembersihan ini kemudian diatur dengan lebih seksama lagi.

Dalam salah satu gerakannya, Kompi Kapten Suripto menyergap sebuah tempat penyimpanan padi di daerah Aermokla yang terletak jauh dari kampung dan diduga menjadi sarang gerombolan Bambu Runcing yang sedang dicari-cari itu. Dugaan itu memang tidak meleset ! Pengepungan segera diadakan untuk kemudian dilakukan serangan terhadap lumbung padi itu. Pimpinan Bambu Runcing, yakni Khaerul Saleh dan Kilap berhasil meloloskan diri dari sergapan itu, namun tak lama kemudian akhirnya dapat tertangkap di daerah Bogor, ke

mana ia meloloskan diri. Dengan demikian berakhirlah segala petualangan gerombolan Bambu Runcing yang sangat merugikan perjuangan Republik Indonesia.

B. Penumpasan Pemberontakan Westerling Dengan APRA-nya

Pembantaian secara besar-besaran yang dilakukan oleh seorang Kapten Belanda, Raymond Westerling terhadap rakyat Sulawesi Selatan. Pada waktu itu, tentara Australia yang telah menyelesaikan tugasnya melucuti tentara Jepang, menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda. Kedatangan pasukan Belanda (NICA) menimbulkan ketegangan antara pemuda-pemuda dengan NICA, yang mulai memecah belah masyarakat dengan mempengaruhi tokoh-tokoh daerah. Maka tampillah pemuda-pemuda pelajar, antara lain A. Rivai, Paersi dan Wolter Mongisidi yang mengusulkan kepada Pusat Pemuda Pelajar Nasional untuk mengadakan perlawanan dengan kekerasan. Mereka kemudian melakukan aksi-aksi yang mengganggu keamanan Belanda, merebut tempat-tempat strategis di kota Makasar yang telah diduduki NICA antara lain Stasiun Radio Makasar, Tangsi Polisi di jalan Gowa, serta H. Expres. Dalam perkembangan selanjutnya Westerling mengadakan “pembersihan” dengan tujuan untuk membersihkan daerah Sulawesi Selatan dari pejuang-pejuang Republik dan mematikan perlawanan terhadap pemberontak Negara Indonesia Timur (NIT).⁴⁴

Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan di “Ridderzaal” Den Haag (Nederland) antara wakil-wakil Kerajaan Belanda, “Bijzonder Federaal Overleg”

⁴⁴ A.B.Lapian dkk, *Terminologi Sejarah 1945-1950 dan 1950-1959*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal. 76-77

(BFO) dan delegasi Republik Indonesia, telah menghasilkan pengakuan kedaulatan terhadap negara kita. Hal ini ternyata menimbulkan rasa tidak puas dikalangan golongan reaksioner, sehingga dengan segala daya dan upaya mereka berusaha untuk merongrong dan melemahkan sendi-sendi kenegaraan kita. Seperti umpamanya mengenai pelaksanaan peleburan KNIL kedalam APRIS, yang bila ditinjau dari sudut politik militer, merupakan suatu kemenangan bagi bangsa Indonesia, dimana ditentukan dalam persetujuan KMB itu bahwa unsur-unsur pimpinan mulai tingkat Batalyon keatas, praktis berada pada tokoh-tokoh TNI. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, ternyata menimbulkan kesulitan-kesulitan psycologis, baik di pihak TNI maupun KNIL.

Kaum reaksioner kontra revolusi dengan subversinya memanfaatkan dan mengolah situasi tersebut untuk kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan mereka sendiri. Dan dalam hal ini mereka memang telah berhasil menerbitkan dan menimbulkan ketegangan-ketegangan untuk kemudian meledak menjadi pemberontakan-pemberontakan dan perbuatan terror diantara golongan ini dengan golongan lain yang tetap berjiwa kontra revolusi guna mencoba merongrong kewibawaan Pemerintah RIS pada waktu itu.

Semenjak pertengahan bulan November 1949, seorang yang bernama Raymond Pierre Westerling, telah menyusun kekuatan yang terdiri atas anggota KNIL yang didemobilisasikan. Organismanya itu dinamakan "Angkatan Perang Ratu Adil" (APRA). Pemimpin-pemimpin dari pada gerakan ini juga meliputi orang-orang Belanda dan mempunyai hubungan yang baik dengan beberapa kesatuan KNIL dan KL yang berada di Bandung dan sekitarnya. APRA atau

Angkatan Perang Ratu Adil itu adalah suatu organisasi gelap bersenjata yang agaknya tidak senang melihat Republik Indonesia kembali “hidup” dan berkembang menjadi sebuah negara yang berdaulat.

Gagasan Raymond Westerling itu ternyata banyak menarik perhatian golongan-golongan yang merasa “dendam” atau “tidak puas” terhadap Republik Indonesia yang kemudian menjelma dengan bajunya yang baru, yakni Republik Indonesia Serikat. Ini pendapat mereka! Kesemuanya itu harus segera dicegah! Itupulalah sebabnya mengapa gagasan Westerling itu mendapat dukungan dan simpati besar dari anggota-anggota KNIL dan KL lainnya, baik yang masih aktif maupun yang telah didemobilisasikan. Mereka ini tergolong orang-orang yang tidak senang dan tidak puas atau kecewa melihat kegagalan dari “ Aksi Polisionilnya” yang kedua, sehingga mereka mempunyai maksud untuk merobohkan RI dengan jalan lain. Mereka tidak senang melihat RI keluar sebagai pemenang dalam pertarungan tersebut. Pula mereka tidak senang melihat RI mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda. Sekalipun APRA ini bersifat illegal, namun dalam kenyataannya adalah tak lain dan tak bukan daripada suatu organisasi atau usaha yang didalangi oleh kaum subversif asing yang ingin mempergunakan kesempatan untuk mengembalikan kolonialisme di bumi Indonesia dengan jalan apapun juga.

Selesai dengan tugasnya di Sulawesi itu, ia ditarik ke Jawa Barat dan kepadanya disertai pimpinan atas sebanyak 1.500 orang Speciale Troepen. Penarikannya dari Sulawesi itu memang dilakukan secara diam-diam dan namanya baru terdengar kembali setelah pihak Belanda melancarkan agresi

kolonialnya yang kedua. Mereka memperlihatkan lagi peranan lama yang pernah mereka lakukan di Sulawesi Selatan. Di daerah-daerah sekitar Cibarusa, Cikalong, Tasikmalaya dan Cirebon terjadi pembunuhan besar-besaran oleh Speciale Troepen itu.

Di Jawa Barat ada TNI, pemuda-pemuda yang bisa membalas bila diserang. Ia mendapat lawan tandingan. Oleh sebab itu ia terpaksa merubah taktik terornya. Di sini ia lebih banyak menggunakan kelicinan dan kelicikan. Kalau dulu ia bertindak dengan terang-terangan dan sesuka hatinya menyebar maut dikalangan masyarakat yang tak berdaya, sekarang taktik infiltrasinya diperbanyak untuk menimbulkan kekacauan yang diharapkannya itu.

1. Rencana Westerling dengan APRA-nya.

Dengan terbentuknya pasukan tersebut, maka Westerling mulai melaksanakan gagasannya, mengadakan aksi-aksi merobohkan kekuasaan RIS yang baru berusia beberapa minggu itu. Kini terdapat tiga kekuatan yang sama-sama ingin merobohkan Republik Indonesia. Pertama, kekuatan yang dipupuk oleh Westerling yang ingin merealisasikan impiannya untuk menjadi seorang "Ratu Adil" di bumi Indonesia. Kedua, kekuatan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia yang bermaksud untuk merombak struktur negara RI menjadi negara Islam, dan ketiga ialah kekuatan-kekuatan subversif asing, yang dengan perhitungan teliti membongcengi kegiatan-kegiatan kedua gerakan tersebut terdahulu serta aktivitas-aktivitas lainnya yang bertujuan menghancurkan RI. Guna melaksanakan cita-citanya itu, Westerling telah mengadakan kontak dengan

pimpinan Darul Islam dan telah terjadi persetujuan untuk melakukan serangan bersama terhadap kota Bandung dan sekitarnya.

Dengan keyakinan penuh bahwa usahanya akan berhasil, maka Westerling dengan penuh keberanian telah mengirimkan sebuah ultimatum kepada Pemerintah RIS, yaitu agar kekuasaan militer di daerah Pasundan/Jawa Barat, sepenuhnya diserahkan saja kepada APRA, mengingat Tentara Nasional Indonesia (TNI) kurang mampu untuk melaksanakan tugas itu. Selain daripada itu, ia minta pula agar pasukannya (APRA) diakui sebagai pasukan resmi.

Berhari-hari lamanya Westerling menunggu jawaban dari pemerintah RIS mengenai ultimatumnya. Oleh karena jawaban tak kunjung datang, maka ia mengambil keputusan untuk melakukan perebutan kekuasaan dengan jalan kekerasan. Menurut rencananya, perebutan kekuasaan itu akan dilaksanakan sekitar tanggal 22-23 Januari 1950. Sasaran utamanya ialah Jakarta dan Bandung. Beberapa ratus anggota tentara Belanda yang “melarikan diri” dari dinas ketentaraan memperkuat rencana Westerling tersebut. Kini timbullah persoalan baru baginya, karena mereka hampir tidak bersenjata sama sekali. Untuk memenuhi akan kebutuhan senjata itu, maka diambillah keputusan untuk melakukan penyerbuan terhadap gudang senjata yang terletak di Bandung Selatan. Sebagian dari pasukannya yang bersenjata lengkap serta mendapat bantuan dari anggota-anggota KNIL, diberi tugas untuk menyerbu Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. Pada tanggal 22 Januari 1950 Westerling sendiri akan memimpin secara langsung terhadap kota Jakarta.

Pada tanggal 22 Januari 1950, pimpinan Divisi Siliwangi telah menerima laporan tentang adanya pasukan yang bergerak di sekitar Cililin yang dipimpin oleh dua orang inspektur Polisi Belanda yang telah melakukan desersi, yaitu Van Beelden dan Vander Meulen. Pertempuran yang agak seru terjadi selama kurang lebih setengah jam pada waktu pasukan-pasukan APRA itu berusaha merebut Markas Divisi Siliwangi yang terletak di Oude Hospitaalweg (sekarang jalan Lembong). Bandung seolah-olah dikuasai oleh APRA.

2. Hasil Perundingan antara Indonesia-Belanda soal APRA.

Dalam pertemuan-pertemuan antara Perdana Menteri RIS dengan Komisaris Tinggi Belanda untuk membicarakan kekacauan-kekacauan yang terjadi di Jawa Barat baru-baru itu, maka pada tanggal 4 Februari 1950 kedua belah pihak telah mencapai persetujuan untuk melakukan tindakan-tindakan bersama dengan secepat mungkin guna menghentikan gerakan-gerakan yang dapat menghambat pembangunan yang cepat dan konstruktif dari Republik Indonesia Serikat yang berdaulat. Komisaris Tinggi Belanda sekali lagi menyatakan penjelasan pemerintahnya, bahwa dalam peristiwa APRA itu telah ikut serta beberapa ratus orang serdadu Belanda yang telah melarikan diri dari kesatuannya.

Pimpinan tentara Belanda telah mengambil langkah-langkah serta tindakan-tindakan untuk menghindari terulangnya kembali kejadian-kejadian seperti itu dan terhadap mereka yang berusaha untuk berbuat demikian lagi, Pemerintah Belanda beserta alat-alatnya tidak akan sangsi-sangsi lagi untuk mengambil tindakan tegas. Setelah pihak APRA meninggalkan kota Bandung,

maka pembersihan-pembersihan terhadap sisa kekuatan APRA terus-menerus dilakukan dengan intensif sekali.

C. Penumpasan Andi Abdul Azis

Pertentangan-pertentangan timbul dan kemudian memuncak antara mereka yang mendukung ide federalisme dan mereka yang mendukung ide unitarisme, di mana yang tersebut terdahulu mempertahankan “Negara Indonesia Timur” (NIT) sebagai negara bagian dari RIS, sedangkan yang tersebut kemudian dengan gigihnya berusaha pula untuk meleburnya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai akibat dari pada hasil Konferensi Meja Bundar, maka anggota-anggota KNIL yang berhasrat melanjutkan bakatnya dalam ketentaraan, disalurkan ke dalam APRIS/TNI.⁴⁵

Pemberontakan kesatuan-kesatuan mantan KNIL di bawah pimpinan Andi Azis. Peristiwa terjadi di Makasar (Ujung Pandang) pada tanggal 5 April 1950. Dibentuknya RIS yang diikuti dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRIS) telah menimbulkan ketegangan-ketegangan. Andi Azis, yang pada masa sebelumnya menjadi Ajudan Wali negara-negara Indonesia Timur, beserta anak buahnya mantan anggota KNIL pada tanggal 30 Maret 1950 diterima masuk APRIS. Andi Azis diangkat menjadi komandan kompi dengan pangkat kapten. Akan tetapi setelah beberapa hari dilantik dengan didukung batalyon KNIL di Makasar yang tidak masuk ke dalam APRIS, kapten Andi Azis mengerahkan pasukannya untuk menawan Pejabat Panglima Territorium

⁴⁵ Disjahdam, *op. cit*, hal. 248

Indonesia Timur, Letnan Kolonel Ahmad Yunus Mokoginta beserta seluruh stafnya. Andi Azis menuntut agar pasukan-pasukan APRIS dan KNIL saja yang bertanggung jawab terhadap keamanan di daerah Negara Indonesia Timur. Mereka menganggap Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak memperdulikan keinginan anggota-anggota KNIL di Ujung Pandang yang menginginkan agar setelah mereka menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), selama satu tahun tidak diadakan integrasi dengan pasukan-pasukan TNI di Jawa.

Di samping itu mereka menginginkan agar NIT tetap dipertahankan. Oleh karena itu ketika batalyon Worang tiba di perairan Ujung Pandang dalam perjalanannya ke Minahasa, Andi Azis dengan pasukannya meninggalkan pos mereka dan memulai penyerbuan terhadap pos-pos TNI lainnya. Dalam menghadapi tindakan dan tuntutan Andi Azis beserta pasukannya, pemerintah segera mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan agar Andi Azis menghadap pemerintah dalam mempertanggung jawabkan perbuatan. Setelah batas ultimatum tidak dipenuhi, akhirnya pemerintah pusat mengirim pasukan ekspedisi ke Makasar untuk menumpas kekacauan tersebut. Pasukan ekspedisi terdiri dari berbagai kesatuan dari ketiga angkatan dan kepolisian dibawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Dengan didahului batalyon Worang yang telah mendarat pada tanggal 18 April 1950, seluruh pasukan ekspedisi berhasil didaratkan pada tanggal 26 April 1950. Kemudian setelah semua pasukan berhasil didaratkan, APRIS segera bergerak dan menguasai kota Makasar dan sekitarnya.

Pada akhirnya Andi Azis menyerahkan diri pada akhir April 1950. Tetapi, walaupun Andi Azis telah menyerahkan diri, pertempuran-pertempuran terus

berlangsung antara pasukan APRIS dan pasukan KNIL. Pertempuran baru berakhir pada bulan Agustus 1950. Pada tahun 1953 tokoh pemberontakan Andi Azis dihadapkan ke pengadilan Militer Yogyakarta. Dari hasil sidang itu ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.⁴⁶

D. Penumpasan Pemberontakan Republik Maluku Selatan

Pemberontakan RMS adalah peristiwa berdirinya Republik Maluku Selatan yang lepas dari Negara Kesatuan Timur (NIT). Peristiwa terjadi di Ambon pada tanggal 25 April 1950, oleh orang-orang bekas KNIL dan pro Belanda, di bawah pimpinan Mr. Dr. Ch. R. Soumokil bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Terbentuknya RIS yang diikuti pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) telah menimbulkan masalah, terutama dari tentara KNIL yang tidak bersedia bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pasukan inti APRIS. Soumokil yang memimpin gerakan separatis ini telah mempersiapkan secara matang "Proklamasi RMS" dengan memindahkan pasukan KNIL dan pasukan Baret Hijau yang terlibat pemberontakan Andi Azis ke Ambon.

Pada tanggal 25 April 1950 mereka mengumumkan berdirinya Republik Maluku Selatan, setelah sebelumnya mereka melakukan terror dan pembunuhan. Dalam menghadapi hal ini, Pemerintah Pusat mencoba menyelesaikan peristiwa ini secara damai. Untuk itu dikirim misi yang diketuai Dr. Leimena ke wilayah tersebut, selain itu pada tanggal 13 Juli diadakan Konferensi Maluku di Semarang.

⁴⁶ A.B.Lapian dkk, *op. cit*, hal. 63-64

Dalam konferensi ini para politikus asal Ambon menganjurkan agar dikirim misi perdamaian ke Ambon. Misi perdamaian yang terdiri dari para politikus, pendeta, dokter, dan wartawan mengalami kegagalan. Usaha yang tidak berhasil itu mendorong pemerintah memutuskan untuk menumpas pemberontakan itu dengan kekuatan senjata. Untuk pelaksanaannya dibentuk sebuah pasukan di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang.

Tanggal 14 Juli 1950, pasukan ekspedisi APRIS/TNI mulai melakukan penumpasan di pos-pos penting RMS. RMS memusatkan kekuatannya di Pulau Seram dan Ambon, selain di darat para pemberontak menguasai perairan laut Maluku Tengah dengan memblokir dan menghancurkan kapal-kapal kecil milik pemerintah. Akhirnya setelah melalui pertempuran-pertempuran sengit, pada tanggal 8 November kota Ambon dapat dikuasai pasukan-pasukan APRIS.

Dalam pertempuran jarak dekat memperebutkan benteng Nieuw Victoria. Komandan Pasukan Letnan Kolonel Slamet Riyadi tertembak dan gugur. Setelah APRIS berhasil merebut kota Ambon dan menangkap tokoh mereka yang terlibat, sisa-sisa pasukan RMS yang masih ada melarikan diri ke hutan-hutan dan untuk beberapa tahun lamanya melakukan kegiatan pengacauan. Soumokil yang berhasil menyelamatkan diri, pada tahun 1962 berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1964.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, hal. 55-56

Demikianlah pembahasan mengenai Peranan Divisi Siliwangi dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan Republik Indonesia tahun 1946-1949. Pada bab selanjutnya akan dibahas mengenai sebab-sebab Divisi Siliwangi mengosongkan daerah basisnya di Jawa Barat.



BAB IV
SEBAB-SEBAB DIVISI SILIWANGI MENGOSONGKAN DAERAH
BASISNYA DI JAWA BARAT

A. Agresi Militer Belanda I Tidak Menghancurkan Siliwangi

Agresi atau Serangan Militer Belanda I adalah serangan serentak yang dilakukan Belanda terhadap daerah-daerah Republik Indonesia. Serangan dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947, perbedaan penafsiran terhadap Persetujuan Linggarjati, yang ditandatangani pada bulan Maret 1947 menjadi penyebab serangan ini. Di satu pihak Belanda menganggap “kerjasama” yang terdapat dalam pasal 2 persetujuan tersebut sebagai kedaulatan Belanda di Indonesia Serikat (NIS).⁴⁸

Dengan bermacam-macam alasan yang dibuat, pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan agresi militernya secara serentak terhadap kedudukan RI di seluruh daerah *de facto* Republik. Serangan Belanda yang mendadak dengan persenjataan yang mutakhir dengan mudah menerobos garis-garis pertahanan TNI yang linier dengan persenjataan terbatas dan sederhana. Kedudukan-kedudukan Republik di Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serentak diserang. Kapal-kapal terbangnya menyerang dan membom landasan-landasan terbang, serta daerah-daerah penting dan tempat-tempat yang dianggap sebagai pusat pertahanan militer.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 3

Di Jawa Barat Belanda mengerahkan dua divisi, dan dengan cepat berhasil menduduki kota-kota penting. Pada hari kedua Cirebon jatuh ke tangan Belanda dan dalam waktu kira-kira satu setengah bulan, kecuali karesidenan Banten, semua kota-kota di Jawa Barat termasuk Garut dan Tasikmalaya mereka duduki. Garis pertahanan TNI terpotong-potong dan pusat-pusat pertahanan diduduki musuh, begitu juga jalan-jalan raya mereka kuasai, sehingga medan gerak TNI menjadi sangat terbatas. Pada mulanya pasukan TNI tercerai-berai, tetapi kemudian mengkonsolidasi diri dan membentuk “kantong” gerilya di sekitar tempat-tempat yang dikuasai Belanda dan melanjutkan perang dengan sistem gerilya. Para prajurit dan pejuang Republik bergerak ke mana-mana menerobos di sela-sela jaringan pos-pos kedudukan musuh. Sejalan dengan taktik gerilya ini sistem berperang pun diubah. TNI tidak bisa lagi bersikap defensif, tetapi mulai mengadakan serangan-serangan terhadap kedudukan Belanda, pos-posnya dan patroli-patrolinya. Keadaan menjadi berbalik; Belanda harus terus menerus bertahan sehingga tidak dapat menggunakan senjata-senjata beratnya.

Dalam situasi yang demikian, tugas para anggota TP Jawa Barat menjadi semakin berat. Sebelum Tasikmalaya jatuh ke tangan Belanda, atas perintah Panglima Divisi Siliwangi, Batalyon III TP Jawa Barat dijadikan Depot Batalyon yang bertujuan untuk mendidik prajurit-prajurit TNI yang baik. Mereka diasramakan di STM dan rencananya akan dilatih oleh pelatih dari Divisi Siliwangi. Akan tetapi ternyata peralatan sangat kurang dan sukar diperoleh, karena Staf Divisi Siliwangi juga sudah mundur ke luar kota. Oleh karena itu Kompi Garut dan Kompi Ciamis terpaksa kembali lagi ke tempat semula di bawah

pimpinan komandannya sendiri. Jadi, yang masih tinggal hanyalah Kompi Tasikmalaya yang tetap berfungsi sebagai Depot Batalyon. Tugas pembinaan dipimpin oleh Kapten Akil dan Kapten Djuchro.⁴⁹

Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama, bertujuan untuk menghancurkan potensi militer kita sehingga dengan demikian mereka takkan mengalami banyak kesulitan untuk menjajah kita kembali. Konsepsinya ialah memusnahkan Reppublik dan menggantinya dengan pemerintahan yang dikepalai oleh seorang Gubernur Jenderal dengan dibantu oleh orang-orang Indonesia sebagai Menteri dan sebuah Parlemen Indonesia. Dalam bulan Juni 1947 kekuatan militernya di Indonesia sudah meliputi 100.000 serdadu dengan perlengkapannya yang serba modern.

Agresi militer Belanda ke-I di Jawa Barat tidak melumpuhkan Divisi Siliwangi, bahkan memperkayanya dengan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Yang kita maksudkan ialah munculnya suatu sistim pertahanan perlawanan gerilya yang bertumpu kepada pemerintahan militer, dalam susunan Wehrkreise-wehrkreise, yaitu W I dan W II pimpinan Kolonel Hidayat dan Kolonel A.H. Nasution. Memang pada awal pertumbuhannya, Tentara Kebangsaan kita memusatkan tenaganya melulu kepada masalah-masalah tempur saja, kepada masalah-masalah menanggulangi kekuatan militer Belanda. Akan tetapi, Agresi Militer Belanda yang dilancarkan semenjak tanggal 21 Juli 1947, telah memaksakan kepada Divisi Siliwangi untuk mengambil/melancarkan bentuk perlawanan gerilya.

⁴⁹ Amrin Imran dkk, *Peranan Pelajar Dalam Perang Kemerdekaan*, Jakarta, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1985, hal. 186-187

Pada tanggal 15 Juli 1946, Panglima Tentara Pendudukan Australia menyerahkan kekuasaan wilayah yang menjadi tanggungjawab pendudukannya, kepada Belanda, untuk kemudian keesokan harinya Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. van Mook, membuka Konperensi “Malino” di sebuah kota pegunungan dekat Makassar, yakni di Malino. Dalam permulaan bulan Oktober 1946, tepatnya tanggal 1 Oktober 1946, pihak Belanda menyelenggarakan Konperensi Minoritas di Pangkalpinang yang antara lain dihadiri oleh wakil-wakil golongan peranakan Cina, Arab, golongan Belanda termasuk Belanda-Indonya. Kemudian, atas dasar keputusan Konperensi yang diikuti oleh “wakil-wakil” dari daerah-daerah di wilayah Indonesia Timur dan Nusa Tenggara, Van Mook mendekritkan terbentuknya “Negara Indonesia Timur” (NIT) dengan Sukawati sebagai “Presiden NIT”. “Negara Boneka” hasil sulapan Belanda itu, adalah sebagai berikut.⁵⁰

- a. “Negara Sumatera Timur” Dr. Mansur sebagai “Wali Negeranya” tanggal 25 Desember 1948.
- b. “Negara Madura” Cakraningrat sebagai “Kepala Negeranya” tanggal 20 Februari 1948
- c. “Negara Pasundan” Wiranatakusumah sebagai “Wali Negeranya” tanggal 24 April 1948.
- d. “Negara Sumatera Selatan” Abdul Malik sebagai “Kepala Negeranya” tanggal 30 Agustus 1948.

⁵⁰ Sedjarah Militer Kodam VI Siliwangi, *Siliwangi Dari Masa ke Masa Jilid I*, Jakarta, Fakta Mahjuma, 1968, hal. 124-125

- e. "Negara Jawa Timur" Kusumonegoro sebagai "Kepala Negeranya" tanggal 26 Nopember 1948.

Disamping "Negara-negara boneka" itu, fihak Belanda pun dengan giatnya membentuk daerah-daerah otonom, yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tengah, Bangka, Belitung, Riau dan Jawa Tengah.

Demikianlah tindak-tanduk Belanda dalam usaha mengepung Republik Indonesia, dengan jalan mendirikan "negara-negara boneka" serta daerah-daerah otonom. Bagi orang-orang Indonesia yang sudah diresapi oleh kesadaran nasional serta kesadaran politik dengan mata sebelah saja sudah dapat menarik kesimpulan bahwa fihak imperialis Belanda mulai melaksanakan politik "divide et impera" yang memang dimasa kejayaannya dahulu sebelum Perang Dunia II, menjadi salah satu senjatanya yang paling ampuh untuk mengadu domba rakyat Indonesia satu sama lainnya.

Pada tanggal 10 Februari 1946, pemerintah Belanda mengeluarkan suatu pernyataan yang pada intinya berisi sebagai berikut:⁵¹

Dengan berdasar atas Pidato Radio Ratu Wihelmina tanggal 6 Desember 1942, dijanjikan kepada rakyat Indonesia, telah melalui masa persiapan tertentu, dengan bebas dapat menetapkan nasibnya sendiri, sesuai dengan pasal 73 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.

Untuk kebahagiaan rakyat Indonesia sendiri, sebaiknya dengan sukarela dilanjutkan perhubungan erat dalam lingkungan "Kerajaan Belanda bentuk baru" yang pesertanya terdiri dari Nederland, Indonesia, Suriname dan Curacao.

Pernyataan Belanda itu dijawab Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Maret 1946 yang intinya adalah sebagai berikut:⁵²

⁵¹ *Ibid*, hal. 126

- a. Menuntut pengakuan kedaulatan Republik Indonesia diatas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda.
- b. Menjamin hak dari golongan minoritas dan politik pintu terbuka bagi kapital asing.
- c. Sanggup mengoper semua hutang dari Hindia Belanda yang terjadi sebelum Maret 1942.
- d. Sedia menjadi peserta dalam Federasi Nederland-Indonesia, dengan hubungan luar negeri dan pertahanan diurus bersama.

Pihak Belanda ternyata tidak dapat menerima tuntutan layak yang telah diajukan oleh pemerintah RI, bahkan kemudian dengan bercermin kepada Persetujuan Vietnam-Perancis tertanggal 6 Maret 1946 yang mengakui Vietnam sebagai negara merdeka, tetapi tetap tergabung dalam Persekutuan Perancis, Van Mook menyampaikan usul kepada Syahrir sebagai berikut:

“Pengakuan Republik Jawa sebagai negara bagian dari Republik Federal Indonesia Serikat, yang menjadi peserta dalam Kerajaan Belanda bentuk baru”. Atas usul Van Mook itu, Sutan Syahrir pada tanggal 27 Maret 1946 memberi jawaban dengan disertai naskah persetujuan berbentuk tractaat yang intinya berisi sebagai berikut.⁵³

- a. Supaya Belanda mengakui Republik Indonesia de facto berdaulat atas Jawa dan Sumatera.
- b. Supaya Belanda dan Republik Indonesia bekerjasama dalam bentuk Republik Indonesia Serikat.

⁵² *Idem*

⁵³ *Ibid*, hal. 127

- c. Republik Indonesia Serikat bersama dengan Nederland, Suriname dan Curacao menjadi peserta dalam suatu ikatan kenegaraan.

Pengalaman telah mengajarkan kebenaran pendapat itu kepada Divisi Siliwangi. Seluruh kota-kota hingga Distrik/Kewedanan Jawa Barat, kecuali daerah Banten, telah jatuh ketangan Belanda dalam agresi kolonialnya yang pertama itu. Divisi Siliwangi terdesak meninggalkan markas-markasnya atau kedudukan-kedudukannya di kota-kota dan menghimpun kedalam pelukannya alam dan masyarakat warga Jawa Barat, di daerah-daerah pedusunan dan menjadikannya pangkal basis perlawanan selanjutnya.

B. Persetujuan Renville

Perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin untuk menerima perjanjian ini sangat merugikan pihak Republik, baik dibidang politis, ekonomis maupun militer. Politis, berarti kita harus mengakui kedaulatan Belanda pada wilayah kita yang diduduki Belanda pada agresi pertama. Wilayah kita tinggal 2/3 di Jawa dan 1/5 di Sumatera. Batas wilayah kita dengan daerah pendudukan itu terkenal dengan nama "garis Van Mook". Ekonomis berarti kita menyerahkan kota besar pusat perindustrian dan perdagangan keluar, serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Belanda untuk melakukan blokade ekonomi terhadap Republik. Militer berarti kita harus menyerahkan kantong-kantong pertahanan/kantong gerilya yang telah disusun dengan susah payah kepada musuh. Umumnya kantong gerilya ini dibentuk di Jawa Barat. Menurut perjanjian



itu Jawa Barat termasuk daerah Belanda. Jadi kantong gerilya yang dibangun di daerah Jawa Barat harus dipindahkan keluar garis Van Mook dan dipindahkan ke daerah Republik.

Akibat perjanjian ini, dari Jawa Barat harus ditarik (dihijrahkan) sejumlah 22.000 prajurit ke daerah Republik. Pengalaman akibat Renville ini sungguh merupakan pengalaman yang tragis bagi divisi yang pernah dihijrahkan (terutama Divisi Siliwangi). Karena itu tidak mengherankan jika keadaan pada saat itu menjadi semakin tegang. Penyelesaian Renville dengan perantaraan Komisi Tiga Negara (KTN) yaitu: Amerika Serikat, Australia, dan Belgia, tidak berhasil menenangkan suasana, bahkan makin berlarut-larut, akhirnya gagal. Kegagalan misi KTN ini telah diperhitungkan oleh Belanda, agar dengan kegagalan ini Belanda mempunyai alasan yang kuat untuk mengagresi Republik. Sebaliknya pihak kita pun telah memperhitungkan kegagalan ini dan kemungkinan agresi baru yang datang dari pihak Belanda. Untuk menghadapi situasi yang semakin gawat itu, kabinet Hatta yang menggantikan kabinet Amir yang ditentang kebijaksanaannya, dalam programnya khusus untuk angkatan perang berusaha secepat-cepatnya melaksanakan Reorganisasi dan Rasionalisasi. Pelaksanaan Reorganisasi dan Rasionalisasi ini diserahkan kepada pucuk pimpinan Angkatan Perang.

Rasionalisasi yang diadakan oleh pimpinan Angkatan Perang mengalami banyak dan berbagai macam kesulitan. Banyak diantara para pemimpin Badan-badan perjuangan tidak menyetujui kebijaksanaan Rasionalisasi. Rasionalisasi hanya dilaksanakan terbatas pada penurunan pangkat saja, sedang tujuan

pokoknya yaitu penyesuaian dengan persenjataan yang ada, belum tercapai. Persoalan Rasionalisasi makin berlarut-larut dan baru berhasil diselesaikan sesudah peristiwa Madiun.⁵⁴

Persetujuan Renville diadakan di atas sebuah kapal pengangkut tentara Amerika Serikat, "USS Renville" yang didatangkan ke Teluk Jakarta. Konferensi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan berakhir pada tanggal 17 Januari 1948. Perbedaan penapsiran terhadap Persetujuan Linggarjati menyebabkan Belanda melakukan aksi militernya yang pertama. Untuk menghentikan permusuhan di antara kedua negara yang bertikai, atas usul Amerika Serikat oleh Dewan Keamanan PBB dibentuk Komisi Jasa-jasa baik (Komisi Tiga Negara) KTN yang akan membantu menyelesaikan masalah. Dalam KTN ini duduk tiga negara, dimana dua negara dipilih masing-masing negara yang bersengketa dan satu lagi dipilih oleh kedua negara tersebut. Indonesia memilih Australia sebagai wakilnya yang diwakili Richard Kirby, Belanda memilih Belgia oleh Paul Van Zeeland dan Amerika Serikat yang diwakili Dr. Frank Graham dipilih oleh Indonesia-Belanda. KTN berusaha mendekatkan kedua belah pihak guna menyelesaikan masalah-masalah militer dan politik yang dapat dipakai sebagai dasar perundingan selanjutnya.

Di dalam bidang militer hanya akan mengambil sikap inisiatif, sedangkan untuk pemecahan masalah-masalah politik, KTN hanya akan memberi usul. Setelah melalui berbagai pendapat mengenai tempat perundingan atas usul KTN, perundingan di tempat yang netral, di atas sebuah kapal pengangkut pasukan

⁵⁴ Saleh.A.Djamhari, *Markas Besar Komando Djawa 1948-1949*, Jakarta, Lembaga Sejarah Hankam, 1967, hal. 5-6

Angkatan Laut Amerika Serikat “USS Renville” yang berlabuh di Teluk Jakarta. Tempat ini dianggap netral karena letaknya di luar daerah pendudukan Belanda. Perundingan ini dibuka resmi pada tanggal 8 Desember 1948 di bawah pimpinan Herremans wakil Belgia dalam KTN.

Dalam perundingan ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Dr. Ali Sastroamidjoyo sebagai wakil ketua. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R.Abdul Kadir Widjoyoatmodjo dengan Mr.H.A.L.Van Vredenbrug sebagai wakilnya. Setelah melalui berbagai perdebatan panjang, akhirnya konperensi dapat menghasilkan persetujuan yang dikenal dengan “Persetujuan Renville”. Persetujuan ditandatangani pada tanggal 17 Januari. Hasil persetujuan itu secara garis besar adalah:⁵⁵

1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan segera.
2. Sebelum RIS terbentuk Belanda tetap berdaulat atas seluruh Indonesia.
3. Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada suatu pemerintah pro-federal.
4. RI dalam RIS merupakan negara bagian.
5. Akan dibentuk UU Indonesia-Belanda dimana keduanya mempunyai kedudukan yang sama.
6. Akan diadakan plebisit (pemilihan oleh rakyat tentang status sesuatu daerah). untuk menentukan kedudukan politik rakyat Indonesia dalam RIS.

Dengan ditandatanganinya Persetujuan Renville yang salah satu isi dari persetujuan itu adalah mengharuskan Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah, ke

⁵⁵ A.B.Lapian dkk, *op.cit*, hal. 91-93

daerah Republik yang waktu itu sudah semakin ciut. Perintah hijrah itu mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 1948 dan berakhir pada tanggal 22 Februari 1948. Kali ini, Persetujuan Renville itu secara langsung, banyak merugikan perjuangan dalam bidang bersenjata, karena dengan adanya persetujuan tersebut terpaksa dilakukan pemindahan pasukan-pasukan dari daerah-daerah yang secara teoritis berada di bawah “kekuasaan” Belanda, ke daerah-daerah yang masih sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Pemindahan pasukan itu kita kenal dengan nama “Hijrah”.

Sesuai dengan persetujuan tersebut, maka mengenai penghijrahan pasukan-pasukan TNI antara lain telah diatur sebagai berikut.⁵⁶

- a. Dalam batas satu minggu, TNI harus meninggalkan kantong-kantong di Jawa Barat, pindah ke daerah kekuasaan Republik Indonesia.
- b. Dalam batas satu minggu harus meninggalkan daerah pendudukan Belanda.
- c. Sebagian kecil dari pasukan Siliwangi yang berada di Jawa Barat, berjalan kaki menuju Banten yang masih 100 % dikuasai oleh Republik Indonesia.

Dengan melaksanakan perintah hijrah itu, maka ini merupakan pula suatu bukti akan ketaatan Divisi Siliwangi kepada pemerintah RI, kepada pimpinan TNI. Perintah untuk melaksanakan hijrah ini disampaikan oleh Panglima Divisi Siliwangi dengan perantaraan kurir-kurir ke Brigade-brigade yang terpecar-pencar.

⁵⁶ Sedjarah Militer Kodam VI Siliwangi, *op. cit.*, hal. 136

Bila ditinjau secara politis, maka Persetujuan Renville itu berarti pengakuan Republik Indonesia "*de jure*" atas kedaulatan Kerajaan Belanda atas Tanah Air. Sedangkan dipandang secara militer, persetujuan itu berarti menyerahkan kantong-kantong gerilya kita yang tidak dapat direbut oleh dan yang telah membuntukan serbuan-serbuan Belanda itu, kepada pihak Belanda. Dengan demikian hal tersebut telah membuat kita menjadi dalam keadaan terkepung dan terancam. Dipandang dari segi ekonomis, Persetujuan Renville berarti, kita menerima keadaan, bahwa semua kota-kota besar, pusat-pusat produksi dan perdagangan keluar, telah berada dalam tangan Belanda. Ekonomis kita dalam keadaan terkepung, terblokada dan tercekik. Demikianlah arti daripada Persetujuan Renville bagi Republik Indonesia yang sudah jelas telah merugikan perjuangan, Revolusi kita.

Dengan lahirnya Persetujuan Renville, maka pasukan-pasukan Divisi Siliwangi harus berhijrah ke Jawa Tengah, meninggalkan kampung halaman, sanak-saudara dan alam-alam perjuangan Jawa Barat yang tercinta. Perjalanan hijrah ini dilakukan: melalui laut, yakni dengan kapal laut berangkat dari Cirebon dan mendarat di Rembang. Melalui darat, yakni dengan kereta api lewat Gombong. Dari sini, dengan menggunakan truk menuju garis demarkasi di Sruweng ke Yogyakarta. Sebagian menuju Kebumen untuk selanjutnya ke Magelang.

Di dalam melaksanakan perintah hijrah dari pemerintah pusat, tidak semua unsure-unsur Jajaran Divisi Siliwangi digerakkan berhijrah. Kita melihat misalnya Brigade I/Tirtayasa tidak disertakan dalam gerakan ini oleh karena masih

menguasai keadaan sepenuhnya. Demikian pula berbagai unsur badan-badan perjuangan ada yang tetap tinggal di kampung halaman. Selama berada di daerah Republik di Jawa Tengah (setelah mengalami hijrah) Divisi Siliwangi mengalami perubahan-perubahan baik dalam unsur-unsur pimpinannya maupun susunannya, dan dikenal juga dengan nama Divisi IV/Siliwangi.

Susunan dan personalia pimpinan Divisi Siliwangi ketika itu adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. *Kepala Staf Divisi Siliwangi*: Letnan Kolonel Daan Yahya.
- b. *Brigade Siliwangi I* berkedudukan di Yogyakarta. Letnan Kolonel Kusno Utomo, menggantikan Letnan Kolonel A.E. Kawilarang, selaku Komandan Brigade dengan Mayor Taswin sebagai Kepala Staf Brigade.
 1. *Batalyon I Yogyakarta*: Komandannya Mayor Kemal Idris.
 2. *Batalyon II Magelang*: Komandannya Mayor A. Kosasih.
 3. *Batalyon III*: Komandannya Mayor Akhmad Wiranatakusumah.
 4. *Batalyon IV* di Yogyakarta: Komandannya Mayor Daeng.
- c. *Brigade Siliwangi II* berkedudukan di Surakarta. Komandan Brigadenya Letnan Kolonel Sadikin, menggantikan Letnan Kolonel Abimanyu.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 140-141

- d. *Brigade Siliwangi "Tambahan"* berkedudukan di daerah Magelang. Komandan Brigadenya Letnan Edi Sukardi, kemudian karena bertugas ke India, diganti oleh Mayor Syamsu.

Persetujuan Renville tidak saja menghilangkan kesempatan kepada Divisi Siliwangi untuk mencicipi "anggur kemenangan" dalam menanggulangi agresi militer Belanda yang pertama itu di Jawa Barat, bahkan Persetujuan Renville tersebut telah menyebabkan Divisi Siliwangi terdesak ke sudut untuk kemudian terlempar dari Jawa Barat, dari kampung halamannya sendiri! Pada tanggal 22 Februari 1948 telah selesai dihijrahkan kira-kira 29.000 perajurit Siliwangi dari kantong-kantong gerilyanya. Periode Perang Kemerdekaan ke-I dalam rangka Revolusi fisik kita buat Divisi Siliwangi di Jawa Barat, berakhir dengan Bergeraknya Divisi Siliwangi, mentaati perintah Pemerintah sebagai salah satu realisasi daripada Persetujuan Renville, menuju seberang "Garis Van Mook". Namun bagaimanapun, perintah hijrah itu merupakan suatu bukti, merupakan kesaksian sejarah, bahwa Jawa Barat tidak pernah berkapitulasi dalam menghadapi perang penjajahan Belanda yang pertama.

Agresi militer Belanda pertama atau yang lebih kita kenal dengan nama Perang Kemerdekaan ke-I, sebetulnya bertujuan untuk menguasai daerah-daerah Republik di Jawa Barat dan Jawa Timur serta menghilangkan daerah-daerah itu dengan penguasaan pantai utara Jawa Tengah. Tujuan ini tidak dapat dicapai oleh Belanda karena mereka hanya berhasil menguasai kota-kota saja serta jalan-jalan besar. Pihak Republik Indonesia masih tetap dapat menguasai daerahnya. Hal ini

agaknya kurang diperhatikan oleh kaum politisi kita ketika diadakan perundingan di atas kapal Amerika Serikat “Renville”.⁵⁸

Dengan telah ditandatanganinya Persetujuan Renville itu, maka sama saja dengan kita telah menerima claim untuk menguasai Jawa Tengah serta Jawa Timur, yaitu yang ditandai oleh “garis Van Mook”. Semua tentara gerilya Indonesia harus ditarik dari kantong-kantong dan penarikan tentara itu berarti bahwa daerah-daerah yang semula dikuasai oleh pasukan-pasukan Siliwangi di Jawa Barat, dengan mentah-mentah diserahkan kepada fihak Belanda yang memang sejak lama sudah mengincarnya. Rakyat yang ada di daerah-daerah itupun “diserahkan pula nasibnya” kepada kekuasaan fihak belanda. Kita telah menerima prinsip “hijrah” yang telah disodorkan oleh fihak Komisi Tiga Negara atau lebih dikenal ketika itu dengan nama KTN, sehingga semua kekuatan Siliwangi ditarik ke balik “dreamline Van Mook”, yaitu sekitar pusat Republik Indonesia di Jawa Tengah.

Perundingan Linggajati telah mendatangkan rasa gelisah di kalangan Putera-putera Siliwangi, maka persetujuan Renville itu telah menimbulkan rasa tidak puas, bahkan dikalangan mereka yang semula bertekad untuk melanjutkan perjuangannya dengan bergerilya. Akan tetapi, bagaimana pahit dan pedihnya juga yang dirasakan oleh “maung” Siliwangi karena dipaksa dan digusur dari hutan belantara Jawa Barat yang mereka cintai dan harus meninggalkan “kantong-kantong” yang telah menjadi tempat berlindung, berteduh terhadap segala badai dan taufan berupa aksi-aksi fihak Belanda, namun sebagai seorang militer harus

⁵⁸ Disjahdam, *op. cit*, hal. 129-130

tetap taat dan tunduk kepada disiplin militer. Akhirnya sesuai dengan isi daripada Persetujuan Renville, dalam waktu 3 minggu para Putera-putera Siliwangi itu harus sudah meninggalkan kantong-kantongnya. Adapun yang ditugaskan untuk menyampaikan perintah “hijrah” itu ke Jawa Tengah, adalah Kolonel T.B.Simatupang, yang tiba di Tasikmalaya selaku utusan dari kementerian pertahanan RI/Markas Besar Tentara menghubungi Jenderal Mayor A.H.Nasution dan Kolonel Hidayat, pada tanggal 1 Februari 1948.

Sebagian kecil dari pasukan-pasukan Siliwangi dengan berjalan kaki menuju ke daerah Banten untuk bergabung dengan Brigade I Tirtayasa yang ada di sana. Brigade Siliwangi yang berada di Banten dan dipimpin oleh Letnan Sukanda Bratamanggala, tidak turut melaksanakan perintah hijrah itu karena berada di suatu daerah yang baik de facto maupun de jure 100 % masih dikuasai oleh Republik Indonesia. Pemberangkatan pasukan-pasukan Siliwangi yang akan dihijrahkan itu dilaksanakan dalam dua eselon besar, yaitu.⁵⁹

- a. Eselon I di bawah pimpinan Letnan Kolonel A.E.Kawilarang, dengan didampingi oleh Letnan Kolonel Kusno Utomo sebagai kepala stafnya.
- b. Eselon II, semula dipimpin oleh Letnan Kolonel Abimanyu, kemudian diganti oleh letnan Kolonel Sadikin, dengan Mayor Syamsu sebagai stafnya.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 132

Perjalanan/pemberangkatan dimulai pada tanggal 2 Februari 1948 dengan melalui darat (dengan kereta api lewat Gombong-Yogya) dan laut (dengan kapal laut) mendarat di Rembang dengan Cirebon sebagai tempat pemberangkatannya.

Mengenai pelaksanaan hijrah ini antara lain digambarkan dalam buku *Sekitar TNI Hijrah*, susunan DISJARAH AD, sebagai berikut:

“.....Sewaktu bergerak meninggalkan daerah kantong guna mentaati hasil diplomasi pemerintah, maka hati yang diliputi oleh rasa kesal, sedih, jengkel yang telah mereda tiba-tiba muncul lagi rasa tidak puas dan menjadi makin meningkat setelah mengalami perlakuan penghinaan dari pihak Belanda. Penghinaan itu antara lain berupa sikap mencemoohkan, mentertawakan, melakukan penjagaan seolah-olah terhadap tawanan perang, ransum yang harus diterima dari lawan, senjata yang harus dikumpulkan dan kata-kata sinis lainnya.⁶⁰

Demikianlah antara lain yang diungkapkan dalam buku *Sekitar TNI Hijrah*, mengenai pelaksanaan penghijrahan Divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Selanjutnya dalam buku tersebut juga diuraikan bahwa pada dasarnya, lubuk hati perajurit TNI menolak untuk melepaskan basis-basis gerilyanya akibat Persetujuan Renville. Akan tetapi sebagai konsekwensi disiplin TNI dan perjuangan nasional, maka ia harus tunduk kepada keputusan pemerintah RI dan harus dapat mengendalikan gelora hatinya. Dengan demikian maka sikap pantang menyerah yang harus dipelihara oleh TNI dipaksakan kepadanya untuk menyerahkan basis-basis (pertahanannya) kepada musuh, sedang unsur pemaksaan biasanya membawa ekses negatif.

Demikian pula halnya yang dirasakan oleh TNI Hijrah Divisi Siliwangi yang diharuskan meninggalkan daerah gerilya yang dicintainya, yang telah dibelanya dengan mempertaruhkan jiwa selama ini. Adalah logis kalau rasa tidak

⁶⁰ *Ibid*, hal. 135

puas yang menyelina dalam lubuk hati TNI-Hijrah sewaktu-waktu dapat meletus dalam berbagai tindak dan perbuatan. Dengan sendirinya tidaklah mudah bagi TNI-Hijrah untuk segera dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya di kota/masyarakat yang masih asing baginya, baik ditinjau dari segi adat-istiadatnya. Sifat sensitif menguasai para anggota hijrah dan sewaktu-waktu dapat meletus menjadi suatu clash dengan segala akibat yang merugikan perjuangan negara bila tidak ditangani secara bijaksana.

Guna melaksanakan Re/Ra itu, maka fihak RI telah mengeluarkan Penetapan-penetapan Presiden serta Undang-undang seperti tersebut di bawah ini.⁶¹

1. Penetapan Presiden No.9 tahun 1948 yang pada pokoknya berisi:
 - a. Menarik kembali Penetapan Presiden No.1 tahun 1948.
 - b. Membubarkan “pucuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia dan staf Gabungan Angkatan Perang”.
 - c. Membentuk Staf Umum Angkatan Perang dalam Kementerian Pertahanan.
 - d. Membentuk Markas Besar Angkatan Perang Mobil, dengan Panglima Besar dan wakil Panglima Besarnya Jenderal R. Sudirman dan Jenderal Mayor Abdul Haris Nasution.
2. Undang-undang No.3 tahun 1948 tertanggal 5 Maret 1948 tentang Organisasi Kementrian Pertahanan dan Angkatan Perang.

⁶¹ *Ibid*, hal. 142

3. Penetapan Presiden tahun 1948 No.14 tertanggal 4 Mei 1948, yang bersifat mengatur tentang pelaksanaan daripada Undang-undang tahun 1948 No.3 tertanggal 5 Maret 1948.

Dengan adanya Re/Ra itu, maka divisi-divisi disusun kembali, sedangkan susunan divisi sebelumnya, yang akibat agresi militer penjajahan Belanda kesatu dan Persetujuan Renville menjadi tidak mempunyai territorial lagi lantaran berhijrah dan susunan-susunan lainnya yang tidak disusun menjadi atau ke dalam salah satu Divisi, maka dimasukkanlah ke dalam susunan "Kesatuan Reserve Umum". Divisi Siliwangi termasuk ke dalamnya.

Didalam pelaksanaannya, maka Re/Ra itu dapat terlaksana dengan baik di tingkat Kementerian Pertahanan, akan tetapi ke bawah, di sana-sini timbul berbagai reaksi. Divisi IV/Panembahan Senopati yang tidak mau melaksanakan Re/Ra, dijadikan Komando Pertempuran Panembahan Senopati, dengan mendapat tambahan satuan-satuan dari Tentara Laut Republik Indonesia. Brigade Suyoto itu merupakan Brigade IX dan Brigade Yadau merupakan Brigade VII dari Komando Pertempuran Panembahan Senopati yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1948.

C. Agresi Militer Belanda Ke-II Menggerakkan Siliwangi Kembali Ke Jawa Barat

Sebagai akibat dari Agresi Kolonial Belanda ke II, pecahlah Perang Kemerdekaan ke-II. Agresi Belanda itu mulai dilancarkan pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda rupa-rupanya belum merasa puas dengan apa yang telah mereka capai dengan agresi kolonialnya yang pertama serta Persetujuan Renville.

Mereka menghendaki lebih dari itu, mereka ingin menghancurkan Republik Indonesia yang menurut pendapat mereka merupakan penghalang yang paling besar dalam usaha mereka untuk menjajah kembali seluruh kepulauan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1948, yakni sehari menjelang peringatan "Hari Proklamasi 17 Agustus". Mereka menembaki secara membabi-buta Gedung Proklamasi di Pegangsaan Timur 56 Jakarta untuk kemudian menyerobot Rumah Sakit Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia dan Jawatan Kesehatan Kota di Jakarta (25 Agustus 1948).

Pada tanggal 17 Desember 1948, pihak Belanda melontarkan ultimatum kepada Republik melalui komisi Jasa-jasa baik PBB, yang oleh pihak Republik harus sudah disampaikan jawabannya pada tanggal 18 Desember 1948. Maka pada tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30 pihak Kerajaan Belanda menyatakan kepada Jasa-jasa Baik PBB, bahwa pihaknya mulai tanggal 19 Desember 1948 pukul 00.00 waktu Jakarta tidak lagi merasa terikat oleh Persetujuan Renville yang sebetulnya telah begitu menguntungkan pihaknya. Untuk melancarkan perang kolonialnya yang kedua itu, pihak Belanda telah melakukan persiapan-persiapan secara besar-besaran sejak bulan November 1948. Kali ini Belanda telah menggunakan seluruh daya mampu militernya sejumlah 135.000 dengan perlengkapan modern yang berasal dari bantuan "Marshall plan" Amerika Serikat.⁶²

Sasaran utama gerakan-gerakan militer tentara Belanda itu sejak semula adalah Yogyakarta beserta tokoh-tokohnya yang dianggapnya sebagai

⁶² *Ibid*, hal. 171-172

jantung yang menggerakkan, tubuh Republik Indonesia. Karena itu tujuan utamanya adalah merebut Yogyakarta secara mendadak. Guna menanggulangi agresi militer Belanda kedua yang oleh pucuk pimpinan Tentara Kebangsaan kita sudah diperhitungkan sebagai suatu hal yang pasti, maka pucuk pimpinan kita mempersiapkan hal-hal serta garis-garis perjuangan yang harus ditempuh selanjutnya, sebagaimana yang tercantum dalam intruksi Panglima Besar No.1 tertanggal 9 Nopember 1948. Dengan demikian melesetlah tafsiran Belanda, bahwa agresi militer Belanda yang kedua itu merupakan suatu "surprise" bagi Republik.

Instruksi Panglima Besar Jenderal Sudirman itu antara lain mengatur perihal.⁶³

- a. Cara perlawanan, ialah bahwa kita tidak lagi akan melakukan pertahanan liniair.
- b. Melakukan siasat/politik bumi hangus.
- c. Melakukan pengungsian atas dasar politik non-kooperasi.
- d. Pembentukan Wehrkreise-wehrkreise. Pasukan-pasukan yang akibat Persetujuan Renville terpaksa hijrah, seperti pasukan-pasukan dari Jawa Barat dan ujung Jawa Timur, harus bergerak kembali menyusup, merembes ke kedudukan-kedudukannya semula.

Maka, tatkala agresi militer Belanda itu dilancarkan pada tanggal 19 Desember 1948, pasukan-pasukan Divisi Siliwangi segera bergerak dari

⁶³ *Ibid*, hal. 173

kedudukan-kedudukannya masing-masing dan bergerak melaksanakan gerakan militer yang kemudian terkenal dengan nama Long March Divisi Siliwangi, suatu perjalanan yang penuh dengan duka-derita, tetapi heroik-patriotik. Memang sudah selayaknyalah kalau setiap perintah yang dikeluarkan oleh pimpinan itu, yang dimaksudkan sebagai seorang prajurit, harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, disiplin serta kesungguhan hati. Sekarang tiba-tiba ada perintah untuk bergerak kembali ke kampung halaman yang sudah sekian lama ditinggalkan dan dirindukan! Hati prajurit Siliwangi mana yang takkan bergejolak hatinya menjalankan perintah itu. Dan belum pernah ada sesuatu perintah yang dapat menyamai perintah semacam itu, yang begitu berkenan di hati serta di sambut dengan penuh hasrat, serta penuh kegembiraan diselingi dengan rasa keharuan yang sangat mendalam sekali.

Maka pada tanggal 19 Desember 1948, bergeraklah, “Si anak Rantau” Siliwangi, bergerak kembali ke tempat asalnya, menuju kampung halaman bersama keluarganya yang dengan satu dan lain cara telah menyusul suami ke kedudukan-kedudukan Divisi Siliwangi di Jawa Tengah.

Demikian pembahasan mengenai sebab-sebab Divisi Siliwangi harus mengosongkan daerah basisnya di Jawa Barat. Pada bab berikutnya akan dibahas mengenai bab penutup atau simpulan yang merupakan jawaban-jawaban permasalahan-permasalahan yang ada.

BAB V

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Divisi Siliwangi dibentuk pada tanggal 20 Mei 1946. Latar belakang dibentuknya Divisi Siliwangi adalah: Bahwa pada tahun 1945 sampai pada akhir tahun 1949, pemerintah Indonesia mengalami tekanan-tekanan dan penjajahan oleh bangsa Barat serta banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan yang merongrong kewibawaan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Kodam VI/Divisi Siliwangi di sepanjang masa tidak pernah absen dalam kancah perjuangan Bangsa dan Negara bersama-sama dengan rakyat, khususnya rakyat Jawa Barat. Dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan Republik Indonesia, Divisi Siliwangi membentuk suatu badan-badan yang akan memperlancar dalam perjuangannya. Badan yang dibentuk diantaranya adalah: Yang pertama membentuk Badan Keamanan Rakyat Jawa Barat, yang kedua membentuk Badan Kelasykaran/Perjuangan. Dengan dibentuknya badan-badan perjuangan ini sangat membantu Divisi Siliwangi dalam menumpas penjajahan dan pemberontakan yang akan merongrong kedaulatan Republik Indonesia.
2. Dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan Republik Indonesia, Divisi Siliwangi mempunyai peranan yang cukup penting dalam menumpas, mengusir dan membebaskan Bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Peranan Divisi Siliwangi dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan Republik Indonesia dapat kita lihat diantaranya: Penumpasan sisa

Gerombolan Bambu Runcing di Banten Selatan, penumpasan pemberontakan Westerling dengan APRA-nya, penumpasan Andi Abdul Azis, dan penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan.

Dengan peranannya yang sangat besar dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Tidak heran apabila Divisi Siliwangi hingga saat ini sangat dikenal dan diagung-agungkan oleh masyarakat Jawa Barat dan Bangsa Indonesia pada umumnya. Perjuangan dan keberhasilan Divisi Siliwangi dalam menanggulangi dan memadamkan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Tanah Air, membawa perubahan dan angin sejuk bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Adapun sebab-sebab Divisi Siliwangi mengosongkan daerah basisnya di Jawa Barat:
 - a. Adanya Agresi militer Belanda I tidak menghancurkan Siliwangi. Serangan militer Belanda I adalah serangan serentak yang dilakukan Belanda terhadap daerah-daerah Republik Indonesia, perbedaan penafsiran terhadap Persetujuan Linggarjati, yang ditandatangani pada bulan Maret 1947 menjadi penyebab serangan ini. Seluruh kota-kota hingga Distrik/Kewedanan Jawa Barat, kecuali daerah Banten, telah jatuh ketangan Belanda dalam agresi kolonialnya yang pertama itu. Divisi Siliwangi terdesak dan kemudian meninggalkan markas-markasnya di Jawa Barat.
 - b. Adanya Persetujuan Renville. Persetujuan Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, perjanjian ini sangat merugikan

pihak Republik, baik dibidang politis, ekonomis maupun militer. Akibat perjanjian ini, dari Jawa Barat harus ditarik (dihijrahkan) sejumlah 22.000 prajurit kedaerah Republik. Pengalaman akibat Renville ini sungguh merupakan pengalaman yang tragis bagi Divisi yang pernah dihijrahkan (terutama Divisi Siliwangi).

- c. Adanya Agresi Militer Belanda ke-II menggerakkan Siliwangi kembali ke Jawa Barat. Sebagai akibat dari agresi kolonial Belanda pecahlah perang kemerdekaan ke-II. Belanda rupa-rupanya belum merasa puas dengan apa yang telah mereka capai dengan agresi kolonialnya yang pertama serta Persetujuan Renville.

Dengan semboyan “Esa Hilang Dua Terbilang” Divisi Siliwangi rela berkorban untuk memperjuangkan tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Dengan semangat yang membara mereka rela meninggalkan keluarga, meninggalkan orang yang dicintai, meninggalkan kampung halaman, dan meninggalkan harta benda mereka, bahkan mereka rela mengorbankan nyawanya untuk pergi bergerilya dan membela tanah air yang mereka cintai. Divisi Siliwangi di sepanjang masa tidak pernah absen dalam kancah Perjuangan Bangsa dan Negara bersama-sama dengan rakyat, khususnya rakyat Jawa Barat. Perjuangan Pejuang-pejuang Siliwangi tersebut merupakan sebagian dari pada sejarah Perjuangan Bangsa yang patut dikenang sepanjang masa.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H.Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid I: Kenangan Masa Muda*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1990.
- _____ *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 2A: Kenangan Masa Gerilya*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1989.
- _____ *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 3, "Diplomasi sambil bertempur"*. Bandung: Angkasa Bandung, 1977.
- _____ *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 4, "Periode Linggajati"* Angkasa Bandung, 1977.
- _____ *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 5, "Agresi Militer Kolonial Belanda I"* Angkasa Bandung, 1977.
- _____ *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 6, "Perang Gerilya Semester I"* Angkasa Bandung, 1977.
- _____ *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 7, "Periode Renville"* Angkasa Bandung, 1977.
- _____ *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 8, " Pemberontakan PKI-1948"* Angkasa Bandung, 1977.
- _____ *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9, "Agresi Militer Belanda II"* Angkasa Bandung 1977.
- _____ *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 10*, Angkasa Bandung, 1977.
- Adeng dkk, *Peranan desa dalam Perjuangan Kemerdekaan 1945-1949*, Dwi Jaya Karya, Jakarta, 1995.

- Anak Agung Gede Agung, *Renville*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Disjahdam VI/Siliwangi, *Siliwangi dari Masa ke Masa*, Angkasa Bandung, Bandung, 1978.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 8*, Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1990.
- Himawan Soetanto, *Rebut Kembali Madiun*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Hugiono dkk, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Kawilarang. A.E, *Untuk Sang Merah Putih*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Kosoh. S.dkk, *Sejarah Daerah Jawa Barat*, Proyek Penerbitan buku bacaan dan sastra Indonesia, Jakarta, 1979.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yayasan Benteng Budaya, Jakarta, 1995.
- Lapian.A.B.dkk, *Terminologi Sejarah 1945-1950 dan 1950-1959*, Defit Prima Karya, Jakarta, 1996.
- Sartono Kartodirdjo, *Peristiwa Tiga Daerah*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1989.
- Sejarah Militer KODAM VI Siliwangi, *Siliwangi Dari Masa Kemasa*, Fakta Mahjuma, Jakarta, 1968
- Smail.R.W, *Bandung in The Early Revolution 1945-1946*, Southeast Asia Program Departemen of Asian Studies, New York, 1964.
- Tanu Suherly, *Sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia*, Departemen Pertahanan-Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



Lampiran: 1

**MANFAAT PENULISAN SKRIPSI BERJUDUL
PERANAN DIVISI SILIWANGI DALAM MEMPERJUANGKAN
TEGAKNYA KEDAULATAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1946-1949 TERHADAP PENGAJARAN SEJARAH**

Perjalanan sejarah merupakan pencerminan dari sikap dan tindakan kita di masa lalu yang merupakan suatu pelajaran penting bagi kita semua. Tanpa mempelajari sejarah, kita akan selalu tersesat ke jalan yang salah, walaupun jalan itu telah kita lewati di masa lalu dalam kondisi dan bentuknya yang berbeda. Untuk tidak mengulangi kesalahan itulah kita wajib mempelajari sejarah dengan berbagai latar belakang yang ada di masa lalu. Sehubungan dengan itu, dalam menuangkan perjalanan sejarah selain diperlukan ketelitian juga diperlukan obyektivitas yang tinggi. Untuk itu diperlukan interpretasi dan penilaian rasionil berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada. Itulah sebabnya, menulis sejarah tidaklah semudah yang diperkirakan orang, aspeknya yang luas dan melibatkan demikian banyak peristiwa serta individu di dalamnya.

Hal ini penting artinya, mengingat kebenaran sejarah akan selalu dijadikan patokan dan pegangan bagi generasi berikutnya. Oleh karena demikian, sulit dibayangkan apa yang akan terjadi, bila sejarah telah dimanipulasikan atau dituangkan dalam bentuk yang berbeda dari kenyataan yang sebenarnya. Hanya bangsa yang tidak mencintai perjuangannya sendiri yang akan memalsukan

sejarahnya. Kita semua tahu, bahwa sejarah perjuangan Divisi Siliwangi sangat identik dengan sejarah perjuangan Rakyat Jawa Barat khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Sepanjang perjalanan hidupnya, Divisi Siliwangi senantiasa menjunjung tinggi dan membela Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Divisi Siliwangi tetap bertekad dengan penuh keyakinan dan keikhlasan hati untuk mengabdikan menjadi prajurit Saptamarga yang sejati

Di era yang serba moderen dengan berbagai macam kecanggihan dan kehebatan manusia untuk dapat menciptakan teknologi serta melahirkan hal-hal yang baru. Dari sekolah-sekolah tingkat sekolah dasar maupun sekolah tingkat tinggi sudah mulai mengenal dan diajarkan untuk memanfaatkan serta mengembangkan teknologi. Dengan teknologi yang canggih pada masa sekarang ini, membuat generasi muda mempunyai wawasan yang sangat luas mengenai informasi baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Dengan kemajuan teknologi seseorang dapat berbuat apa saja tanpa harus memikirkan kepentingan orang lain, walaupun harus merugikan bangsa dan negaranya sendiri. Dengan sikap seperti ini lama kelamaan dapat melunturkan semangat gotong royong, patriotisme dan nasionalisme yang merupakan warisan para pahlawan. Mementingkan kepentingan diri sendiri dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi telah menguasai jiwa manusia jaman sekarang. Bila hal ini terjadi terus-menerus, maka akan berakibat buruk bagi bangsa Indonesia.

Mempelajari sejarah dapat berarti bercermin kepada masa lampau, menyempurnakan dan meningkatkan prestasi masa kini dan masa mendatang.

Penulisan sejarah militer merupakan suatu mata rantai kegiatan yang tak pernah terhenti dan tidak boleh berhenti. Inipulalah yang menjadi pangkal tolak penulisan skripsi yang berjudul Peranan Divisi Siliwangi dalam Memperjuangkan Tegaknya Kedaulatan Republik Indonesia. Dengan skripsi ini setiap prajurit ABRI pada umumnya dan macan-macan Muda Siliwangi khususnya, akan dapat mempelajari proses serta peranan perjuangan Divisi Siliwangi sejak lahirnya pada tanggal 20 Mei 1946 di Tasikmalaya hingga dewasa ini, sebagai bekal yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan tugas sekarang dan waktu yang akan datang.

Penulisan skripsi ini diharapkan pula dapat merupakan salah satu sarana untuk mewariskan kepada generasi penerus suatu semangat perjuangan yang pantang menyerah, jiwa pengabdian yang tanpa pamrih, serta dedikasi yang penuh loyalitas terhadap Negara dan Bangsa. Skripsi ini juga diharapkan dapat pula berperan sebagai suatu media komunikasi untuk memanunggalkan Siliwangi dengan rakyat.

Dengan makin menipisnya secara alamiah barisan TNI 45 dan hadirnya suatu generasi TNI yang tidak mengalami perang kemerdekaan atau gerakan-gerakan operasi militer (GOM ke I sampai dengan GOM ke IX), penulisan skripsi tentang sejarah TNI/ABRI atau bagian-bagiannya mempunyai manfaat dan arti yang sangat besar bagi kita semua. Demikian pula penulisan skripsi tentang Peranan Divisi Siliwangi Dalam Memperjuangkan Tegaknya Kedaulatan Republik Indonesia ini, yang pada hakekatnya berisi sejarah perjuangan KODAM IV/Siliwangi pada khususnya dan perjuangan rakyat Jawa Barat pada umumnya dalam menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan

bangsa, sungguh sangat besar manfaatnya, tidak hanya bagi warga Siliwangi, melainkan juga bagi warga ABRI dan rakyat pada umumnya, terutama generasi mudanya.

Penulisan skripsi dengan judul Peranan Divisi Siliwangi dalam Memperjuangkan Tegaknya Kedaulatan Republik Indonesia ini mempunyai manfaat yang sangat penting karena dengan langkah ini akan diketahui sejarah perjuangan KODAM IV/Siliwangi pada khususnya, bukan saja oleh Slagorde KODAM IV/Siliwangi, melainkan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan generasinya tentang peranan Siliwangi dan rakyat Jawa Barat, dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan. Di samping itu skripsi ini merupakan sarana komunikasi yang tepat, karena penulisan skripsi ini bukan sekedar untuk pengenalan sejarah perjuangan KODAM IV/Siliwangi dan rakyat Jawa Barat saja, melainkan sebagai sarana pendidikan pula bagi generasi kini maupun generasi penerus, tentang hakekat perjuangan KODAM IV/Siliwangi dari masa ke masa, sesuai dengan pasang surutnya perjuangan bangsa.

Bila kita cermati lebih mendalam, ada sesuatu yang penting dan ditinggalkan oleh generasi muda sekarang, yang akan berdampak pada kurang sadarnya generasi muda akan pentingnya sikap nasionalisme dan patriotisme yang lama-kelamaan mulai luntur. Patriotisme merupakan paham yang mencintai tanah air atau semangat cinta tanah air, seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan untuk keutuhan tanah airnya. Sikap patriotisme juga tercermin dalam usaha untuk menjaga kemerdekaan dengan segala cara termasuk dengan mengorbankan jiwa dan raganya. Untuk menumbuhkan sikap patriotisme

dalam diri siswa perlu kiranya diajarkan pelajaran sejarah di dalam dunia pendidikan. Generasi muda harus diberi pengetahuan tentang pentingnya belajar sejarah bangsanya dan manfaat yang dapat diperoleh apabila belajar sejarah. Untuk dapat mengerti dan memahami tentang sejarah bangsanya, generasi muda harus memiliki kemauan untuk belajar sejarah.

Sejarah perjuangan Divisi Siliwangi merupakan salah satu sejarah yang hampir terlupakan oleh segenap rakyat Indonesia. Sejarah dianggap sebagai ilmu yang tidak pernah mengalami kemajuan dan belajar sejarah dianggap seperti belajar hal-hal yang kuno. Hampir sebagian siswa dan masyarakat tidak mengenal apa itu sejarah Divisi Siliwangi. Padahal Siliwangi ini mempunyai peranan yang cukup penting di dalam memperjuangkan tegaknya kemerdekaan kedaulatan Republik Indonesia. Berkat Siliwangilah Negara Republik Indonesia masih berdiri kokoh hingga saat ini. Semangat rela berkorban para pejuang inilah yang patut kita contoh, kita teladani, kita teruskan dan kita warisi.

Sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Mempelajari sejarah berarti mengingat kembali peristiwa atau kejadian pada masa lampau. Peristiwa atau kejadian tersebut kemudian dapat kita jadikan cermin untuk melihat masa yang lalu dan dapat kita ambil hikmahnya sebagai bekal untuk dapat menatap masa depan yang lebih baik. Jadi mempelajari sejarah bukan hanya sekedar menghafal, tetapi yang terpenting adalah mengambil makna dari sejarah itu sendiri. Hal inilah yang harus diterapkan oleh para pendidik dalam pengajaran sejarah. Sehingga siswa atau generasi muda akan lebih menghargai apa itu sejarah.



Belajar sejarah dapat memberikan bekal kepada siswa atau generasi muda untuk dapat melangkah ke depan. Agar dapat melangkah ke depan, seseorang harus dapat melihat masa lalunya yang kemudian dapat dijadikan patokan untuk melangkah ke depan. Seperti halnya bangsa Indonesia, agar dapat maju bangsa Indonesia harus dapat melihat dan mengerti sejarah bangsanya sendiri, yang kemudian dijadikan sebagai landasan untuk maju ke depan. Belajar dari kegagalan dan keberhasilan masa yang lalu dapat menjadi dasar bagi suatu negara untuk berkembang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah bangsanya. Bila suatu bangsa melupakan sejarah bangsanya, maka negara tersebut akan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang mencintai sejarah. Dengan belajar sejarah, generasi muda akan belajar dari kegagalan di masa yang lalu dan tidak akan mengulangnya pada masa sekarang.

Generasi muda pada masa sekarang cenderung kurang menyukai bahkan meninggalkan sejarah bangsanya. Di bangku sekolah, pelajaran sejarah hanya diajarkan sepiantas dan tidak secara mendalam. Sejarah dianggap sebagai pelajaran yang kurang penting. Hal inilah yang kemudian memunculkan persepsi negatif dari diri siswa dan generasi muda terhadap sejarah. Mereka mempunyai persepsi bahwa sejarah itu sifatnya hanya hafalan dan sangat membosankan untuk dipelajari.

Pada masa sekarang ini generasi muda kurang sadar akan pentingnya belajar sejarah. Sejarah diibaratkan sebagai pelajaran yang membosankan karena hanya menekankan pada hafalan dan mencatat saja. Tidak heran bila generasi muda sekarang hampir sebagian tidak tau banyak tentang sejarah bangsanya

sendiri. Generasi muda hingga saat ini banyak yang belum menyadari, bahwa belajar sejarah bukanlah pelajaran yang hanya menekankan pada hafalan, dengan belajar sejarah dapat ditanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme kepada para siswa dan generasi muda pada umumnya. Para siswa dan generasi muda juga diajarkan untuk dapat menghargai jasa para pahlawan dan mengingat kembali perjuangan mereka dalam merebut dan mempertahankan tegaknya kedaulatan Republik Indonesia.

Hal seperti ini mungkin tidak akan pernah terjadi apabila sejak dini para siswa dan generasi muda sudah mulai diajarkan untuk mencintai sejarah bangsanya, baik melalui media pendidikan di sekolah-sekolah maupun di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan menanamkan sikap untuk mencintai sejarah bangsanya, maka siswa dan generasi muda akan lebih dapat menghargai jasa para pahlawan. Kepedulian para siswa dan generasi muda untuk mau melihat ke belakang sejarah bangsanya merupakan salah satu wujud cinta terhadap warisan budaya bangsa. Manusia tidak akan pernah hidup tanpa ada masa lalu. Dan manusia tidak akan pernah bisa berkembang tanpa belajar dari masa lalu.

Penulisan skripsi yang berjudul Peranan Divisi Siliwangi dalam Memperjuangkan Tegaknya Kedaulatan Republik Indonesia, ditulis dengan tujuan untuk mengingat dan mengungkap kembali sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang hampir dilupakan oleh para siswa dan generasi muda pada umumnya. Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan para siswa dan generasi muda dapat mewarisi dan meneladani perjuangan para tokoh Divisi Siliwangi dalam

memperjuangkan tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Perjuangan Divisi Siliwangi juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda yang akan meneruskan perjuangan bangsa Indonesia. Kita harus menyadari bahwa perjuangan itu tidak akan pernah berhenti dan tidak mengenal lelah.

Bila dikaji secara rinci Siliwangi mempunyai peranan yang sangat penting dalam perjuangan sejarah bangsa Indonesia. Keberanian dan semangat juang Siliwangi patut mendapat penghormatan dari seluruh rakyat Indonesia. Ketika negara sedang dalam keadaan kacau karena dijajah oleh bangsa Asing, Siliwangi muncul kepermukaan untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Perjuangannya menggelorakan semangat rakyat untuk terus berjuang tanpa mengenal lelah. Agar para siswa dan generasi muda pada umumnya dapat mengetahui secara mendalam tentang peranan Divisi Siliwangi dalam usahanya memperjuangkan tegaknya kedaulatan Republik Indonesia, perlu kiranya diajarkan kepada generasi muda untuk belajar sejarah Divisi Siliwangi. Dengan belajar melalui sejarah perjuangan Divisi Siliwangi, generasi yang akan datang dapat mencontoh keberanian, semangat nasionalisme dan patriotisme para tokoh Siliwangi, sehingga perjuangan Siliwangi dapat dikenang sepanjang masa.

Skripsi yang berjudul peranan Divisi Siliwangi dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan Republik Indonesia tahun 1946-1949, memiliki nilai-nilai yang sangat penting bagi generasi muda dalam melanjutkan perjuangan dimasa sekarang ini. Generasi muda pada masa sekarang harus memiliki kesadaran bahwa mempertahankan kemerdekaan merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan pengorbanan serta kerja sama seluruh rakyat Indonesia. Generasi

muda harus menyadari betapa sulitnya mempertahankan kemerdekaan itu. Jadi sekecil apapun perjuangan para pejuang harus kita hargai dan kita hormati. Supaya semangat juang yang diwariskan para pejuang Siliwangi kepada kita tidak luntur tertelan waktu.

Dengan membaca skripsi yang berjudul peranan Divisi Siliwangi dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Generasi muda diharapkan juga tahu apa peranan Divisi Siliwangi dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan Republik Indonesia dan bagaimana bentuk perjuangannya. Sehingga dapat mengambil nilai-nilai kepahlawanan yang terkandung didalamnya. Nilai-nilai tersebut sangat penting bagi generasi penerus di dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Divisi Siliwangi telah memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Sehingga sumbangan tersebut dapat diwarisi generasi muda pada masa sekarang ini. Bila dikaji secara mendalam, sejarah perjuangan Divisi Siliwangi mengandung berbagai aspek yang sangat menarik. Aspek yang sangat menarik adalah di bidang militer, politik, hukum dan pemerintahan.

Dengan mempelajari sejarah Divisi Siliwangi, maka kita akan tahu perjuangan Divisi Siliwangi dari mulai terbentuknya sampai peranannya dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Kita mengharapkan sikap nasionalisme dan patriotisme para tokoh Siliwangi bisa menjadi panutan dan inspirasi kaum muda untuk melanjutkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Disamping itu juga jejak-jejak para pejuang Siliwangi dapat diikuti oleh generasi

muda sekarang dan yang akan datang. Sehingga semangat juang yang telah dirintis para pejuang tidak akan pernah padam dan berhenti.

KODAM IV/Siliwangi disepanjang masa tidak pernah absen dalam kancah perjuangan Bangsa dan Negara bersama-sama dengan rakyat, khususnya Rakyat Jawa Barat. Dengan mengetahui isi skripsi sejarah perjuangan Divisi Siliwangi, penulis mengharapkan generasi penerus dapat mencontoh dan meniru perjuangan para pahlawan-pahlawan kita dengan semangat pengorbanan dan perjuangannya yang tidak pernah menyerah terhadap segala bentuk hambatan dan rintangan dari manapun datangnya.

Perjuangan pejuang-pejuang Siliwangi tersebut merupakan sebagian daripada sejarah perjuangan Bangsa yang patut dikenang sepanjang masa, yang patut diwarisi dan menjadi tauladan bagi generasi penerus, sebagai pelanjut perjuangan Bangsa dan Negara. Melalui fakta sejarah yang obyektif diharapkan agar nilai yang tinggi dan semangat TNI -45 serta pengabdian tanpa pamrih.

Demikianlah manfaat yang dapat diambil dari belajar sejarah Divisi Siliwangi dalam memperjuangkan tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Semoga skripsi ini dapat memberikan acuan kepada para pembaca untuk mau belajar sejarah, terutama sejarah bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Harapan penulis, hendaknya skripsi ini dapat dibaca oleh setiap prajurit dan masyarakat luas, terutama generasi muda Bangsa Indonesia, untuk dapat belajar menghayati perjuangan generasi terdahulu.

Lampiran: 2

SILABUS

SEKOLAH MENENGAH ATAS

Mata Pelajaran : Sejarah

Kelas / Semester : 2 / 3

Alokasi Waktu : 6 Jam

Kompetensi Dasar	Kemampuan menganalisis perjuangan Bangsa Indonesia di dalam memperjuangkan tegaknya Kedaulatan Republik Indonesia.
Hasil Belajar	Memahami sejarah peranan Divisi Siliwangi dalam memperjuangkan tegaknya Kedaulatan Republik Indonesia tahun 1946-1949.
Indikator	1. Menjelaskan latar belakang dan proses terbentuknya Divisi Siliwangi. 2. Menjelaskan peranan Divisi Siliwangi dalam Penumpasan Pemberontakan Terhadap Republik Indonesia tahun 1946-1949. 3. Menganalisis sebab-sebab

Nilai-nilai Moral	Divisi Siliwangi mengosongkan daerah basisnya di Jawa Barat. 4. Semangat Nasionalisme, Patriotisme, Cinta Tanah Air dan rela berkorban.
Tujuan Pembelajaran	Siswa Mampu Menjelaskan: 1. Latar belakang dan proses terbentuknya Divisi Siliwangi. 2. Peranan Divisi Siliwangi dalam Penumpasan Pemberontakan Terhadap RI. 3. Sebab-sebab Divisi Siliwangi mengosongkan daerah basisnya di Jawa Barat.
Langkah Pembelajaran	I. Pendahuluan - Apersepsi - Penyampaian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. II. Kegiatan Inti - Menjelaskan materi pelajaran melalui ceramah ,diskusi dan tanya jawab tentang:

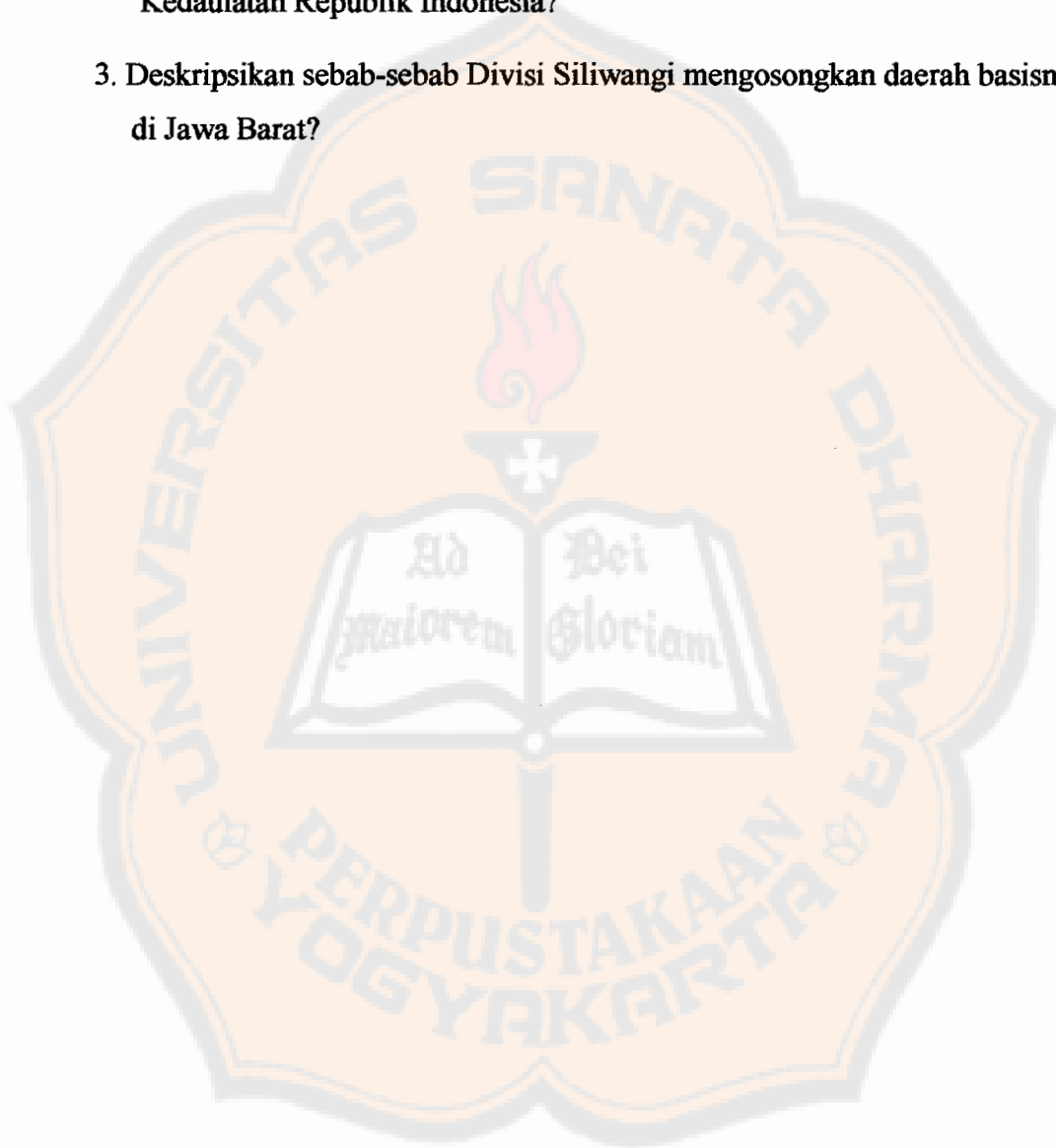
	1. Latar belakang terbentuknya Divisi Siliwangi. a. Badan Keamanan Rakyat Jawa Barat dibentuk. b. Pembentukan Badan Kelasykaran/ Perjuangan. c. Mengisi, menegakkan dan mempertahankan Proklamasi. 2. Peranan Divisi Siliwangi dalam Penumpasan Pemberontakan Terhadap Republik Indonesia. a. Peranan Divisi Siliwangi dalam mengamankan Pancasila. b. Peranan Divisi Siliwangi dalam menegakkan Pancasila. c. Peranan Divisi Siliwangi dalam Dwikora. 3. Sebab-sebab Divisi Siliwangi mengosongkan daerah basisnya di Jawa Barat.
Sarana dan Sumber Pembelajaran	A. Sarana Pembelajaran

	1. Gambar Pataka Siliwangi dan Sampana RINDAM VI/Siliwangi. 2. Gambar Panglima Siliwangi ke-13 Mayor Jenderal TNI Himawan Soetanto. 3. Peta route hijrahnya Divisi Siliwangi dan peta Long March Siliwangi. B. Sumber Pembelajaran 1. Buku referensi tentang Divisi Siliwangi. a. Disjahdam VI/Siliwangi, 1978, Dari Masa ke Masa, Angkasa Bandung. b. Himawan Soetanto, 1994, Rebut Kembali Madiun, Jakarta: Sinar Harapan.
Penilaian	1. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami sejarah peranan Divisi Siliwangi di dalam memperjuangkan tegaknya Kedaulatan Republik Indonesia tahun 1946-1949. Dapat dilakukan dengan tes tertulis berbentuk essay baik secara

	tertutup maupun terbuka. 2. Memberikan tugas kepada siswa seperti: - Menganalisis arti penting terbentuknya Divisi Siliwangi. - Menganalisis Peranan Divisi Siliwangi dalam Penumpasan Pemberontakan Terhadap Republik Indonesia. - Menganalisis sebab-sebab Divisi Siliwangi mengosongkan daerah basisnya di Jawa Barat. 3. Mencatat serta mengamati kegiatan siswa selama dalam proses belajar dan diskusi di kelas. 4. Porto Folio: - Guru mencatat aktifitas setiap siswa sesuai dengan kategori kegiatan yang telah ditentukan. - Guru menyimpulkan seluruh kegiatan siswa baik secara individual maupun kelompok.
--	--

Alat Evaluasi:

1. Jelaskan latar belakang terbentuknya Divisi Siliwangi?
2. Jelaskan peranan Divisi Siliwangi di dalam memperjuangkan tegaknya Kedaulatan Republik Indonesia?
3. Deskripsikan sebab-sebab Divisi Siliwangi mengosongkan daerah basisnya di Jawa Barat?



Lampiran: 3

BANDUNG SELATAN

Bandung Selatan Di Waktu Malam

Terselubung Sutera Mega Putih

Laksana Putri Lenggang Kencana

Duduk Menanti Akan Kekasih

Bandung Selatan Di Waktu Malam

Jauh Terdengar Suara Nyanyian

Sungguh Indah Sinarnya Rembulan

Riwayatnya Tiada Dilupakan

Terdengar Suara Seruling Bambu

Gita Malam Nan Merdu Merayu

Di Seling Tembang Suara Ibu

Tentang Pusaka Nan Sakti

Bandung Selatan Di Waktu Malam

Dalam Asuhan Dewi Purnama

Sungguh Indah Sinarnya Rembulan

Riwayatnya Tiada Dilupakan

Lagu ini mengingatkan kita pada Suatu kota yaitu kota Bandung, Dimana kota Bandung menyimpan Banyak kenangan yang tidak akan pernah Kita lupakan. Disaat sedang sepi para pejuang kita menyanyikan lagu ini.



Lampiran: 4

HALO-HALO BANDUNG

Halo-Halo Bandung, Ibu Kota Priangan

Halo-Halo Bandung, Kota Kenang-kenangan

Sudah Lama Beta, Tidak Berjumpa Dengan Kau

Sekarang Telah Menjadi Lautan Api

Mari Bung Rebut Kembali

Lagu ini dinyanyikan untuk memberi semangat para pejuang kita yang saat itu mulai putus asa. Setelah lagu ini dinyanyikan semangat para pejuang kita untuk merebut kota Bandung yang telah hancur pulih kembali.

Sumber: Sedjarah Militer KODAM VI Siliwangi, *Siliwangi dari Masa ke Masa*, Fakta Mahjuma, Jakarta, 1968.

Lampiran: 5

PETAKA SILIWANGI



Sumber: Disjarahdam VI/Siliwangi, *Siliwangi Dari Masa ke Masa*, Angkasa Bandung, Bandung, 1978.

ARTI ATAU/CITA-CITA LAMBANG KOMANDO DAERAH MILITER VI/SILIWANGI YANG TERSEBUT DALAM PANJI-PANJI

PATAKA SILIWANGI

Motto:

Pataka Siliwangi adalah cermin mutlak bagi yang memilikinya tempat bernaung dan berpedoman hidup:

- ✓ Cermin sejarah kebangsaan daerah atau/tempat semula berpijak, yang harus dihormati.
- ✓ Cermin keluhuran budi dan pekerti yang harus tetap tergalang tak lekang bernapas maupun rapuh kehujanan.
- ✓ Cermin tata-tertib yang kokoh kuat.
- ✓ Cermin jalinan setia kawan bagaikan rantai membaja.
- ✓ Cermin keteguhan berdoktrin Negara yang senantiasa tetap terpelihara.

Kiasan:

1. Kepulauan Indonesia dilingkari tali menyatakan: Kesatuan yang meliputi seluruh Kepulauan Nusantara yang berbahasa satu, bertanah air satu, di mana Siliwangi sebagai salah satu alat kekuasaan Negara dan sebagian dari kesatuan. Warna kuning melambangkan ketenangan jiwa. Warna coklat melambangkan tempat berpijak dan kedewasaan.
2. Rangkaian daun kapas dan rangkaian padi melambangkan kemakmuran/kesejahteraan rakyat dan Negara, yang diijadikan tujuan dan pegangan. Atas dasar cita-cita tersebut Divisi Siliwangi melaksanakan tugas dengan hati jujur dan suci.
3. Pita pengikat berwarna merah putih menyatakan lambang Negara dan Bangsa yang harus menjadi dasar kesadaran dalam mencapai kesejahteraan/kemakmuran dan tali pengikat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; warna hijau berarti:

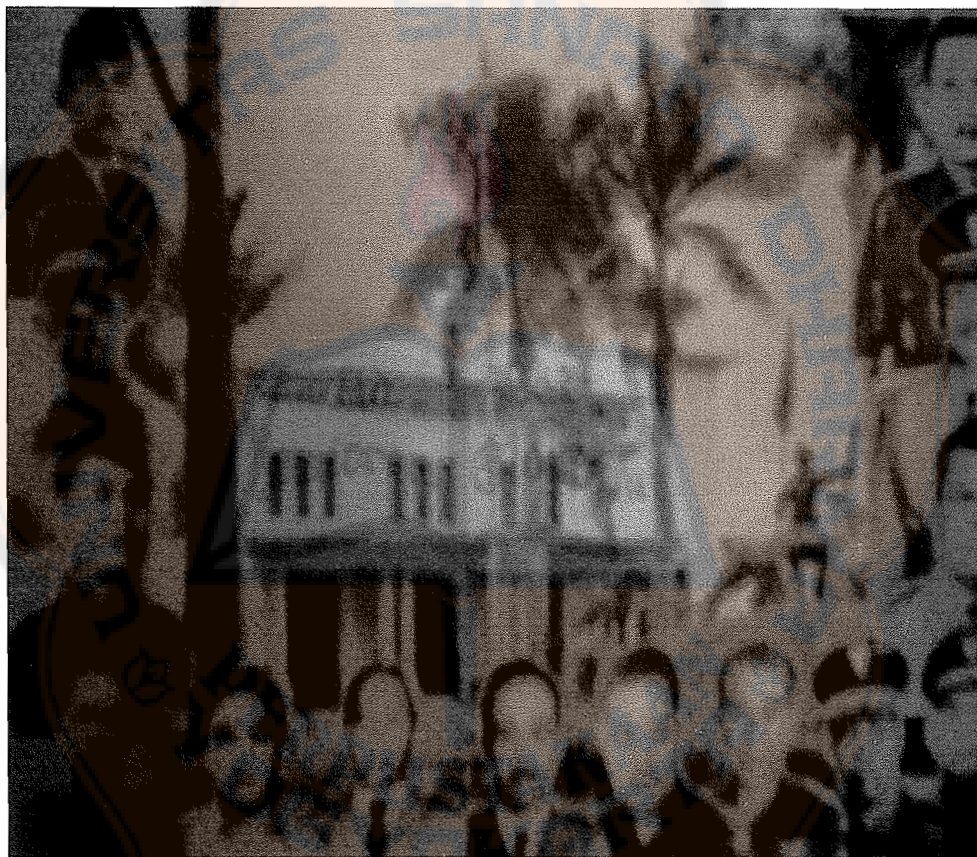
kesejahteraan/kemakmuran dan tali pengikat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; warna hijau berarti:

- Warna lapangan tempat Angkatan Darat, Infanteri terutama melaksanakan tugasnya.
- Warna harapan, harapan timbal balik antara massa dan Divisi Siliwangi, bahwa Divisi Siliwangi akan tetap menjadi pelindung Negara dan Bangsaanya sepanjang masa.
- Menghiaskan kesuburan bumi Indonesia gelanggang tempat Divisi Siliwangi dilahirkan, berpijak dan dibesarkan.

4. Kata-kata Tentara RI Angkatan Darat Divisi Siliwangi, menyatakan bahwa Siliwangi adalah Tentara RI yang selalu setia mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa. Warna merah menyatakan keberanian dan keperwiraan dalam menunaikan tugasnya.
5. Siliwangi lambang kebesaran Prabu Siliwangi, yang pantang menyerah, dipakai sebagai kiasan dari pada kekerasan hati, kebulatan tekad Keperwiraan dan daya capai dalam membuktikan mengejar cita-citanya untuk membaktikan dharma guna keluhuran dan keagungan Ibu Pertiwi.

Lampiran: 6

GAMBAR PARA TOKOH PANGLIMA DIVISI SILIWANGI



Sumber: Disjarahdam VI/Siliwangi, *Siliwangi Dari Masa ke Masa*, Angkasa Bandung, Bandung, 1978.

